

**PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
2007 - 2015**

S K R I P S I



SARTIKA AYU MENTARI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

**PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
2007 - 2015**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan*

**SARTIKA AYU MENTARI
1262041004**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan Nomor /UN36.6/KM/2016 tanggal 1 Desember 2016, untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2016.

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum.

NIP. 19671231 199303 1016

Panitia Ujian:

- | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum. | (.....) |
| 2. Sekertaris | : Dr. Najamuddin, M. Hum | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Ahmadin.M.Pd | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : Dr. H. Muh. Rasyid Ridha, M. Hum | (.....) |
| 5. Penguji I | : Drs. H.Muh. Saleh Majid.M.Pd | (.....) |
| 6. Penguji II | : Dr. Patahuddin, M. Pd | (.....) |

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor: /UN.36.6/PL/2016 untuk membimbing saudara:

Nama : Sartika Ayu Mentari

NIM : 1262041004

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : **Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah 2007-2015**

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan dapat diajukan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Makassar, September 2016

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Najamuddin, M.Hum
Nip.19640723 199203 1 003

Dr. Patahuddin, M.Pd
Nip. 19641231 199003 1 033

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

FIS UNM

Dr. Patahuddin, M.pd
Nip. 19641231 199003 1 033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika Ayu Mentari
NIM : 1262041004
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 21 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah (S1)
Judul Skripsi : **Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah
2007-2015**

Dengan dosen pembimbing masing-masing:

1. Dr. Najamuddin, M.Hum

2. Dr. Patahuddin, M.Pd

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/ luar pengadilan dan menanggung segala resiko dan akibatnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, September 2016

Diketahui oleh :

Ketua Prodi Pendidikan Sejarah

Yang Membuat Pernyataan

Dr. Patahuddin, M.Pd
NIP.19641231 199003 1 003

Sartika Ayu Mentari
NIM. 1262041004

MOTTO

Mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru dan berusahalah untuk merubah mimpi itu menjadi kenyataan!!

(Soichiro Honda)

*Hidup adalah memilih dan dipilih. Berani memilih berani menjalani
konsekuensinya... (Sartika Ayu Mentari, 2016)*



*Kupersembahkan karya ini sebagai salah satu bukti cinta dan sayangku kepada
kedua orang tuaku, kakak-kakakku, adikku dan semua pihak yang telah
membantu yang telah menjadi motivasi dan inspirasi serta tiada henti
memberikan dukungan do'anya buatku...*

(I love you all)

ABSTRAK

Sartika Ayu Mentari, 2016. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (2007-2015). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Najamuddin dan Patahuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Mamuju Tengah, latar belakang munculnya gagasan pembentukan, proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dan kondisi Mamuju Tengah setelah menjadi sebuah Kabupaten. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan sejarah melalui tahapan-tahapan kerja historis yang meliputi: Heuristik (pengumpulan data), Kritik ekstern dan kritik intern, Interpretasi dan Historiografi (penulisan) yang merupakan tahapan akhir pengungkapan kisah sejarah secara tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah karena rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat yang ada di daerah Mamuju Tengah teramat jauh sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lambannya pelayanan pembangunan dan lambannya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Perjuangan masyarakat dan pemerintah yang begitu panjang sejak tahun 1963 menuai hasil pada tanggal 14 Desember 2012 dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Tobadak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat dengan Penjabat Bupati sementara Junda Maulana.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah sebenarnya sudah lama diwacanakan dan kemudian baru dapat terealisasi dengan diresmikannya secara sah pada tahun 2012 yang disambut baik oleh segenap kalangan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa karena hanya hanya atas izin dan karuniaNya. Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan. Tak lupa pula salawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Penulis pun senantiasa menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. sehingga melalui kesempatan ini pula penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari segenap pembaca demi penyempurnaan selanjutnya. Selama dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang begitu berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
2. Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan para Pembantu Dekan serta staf dalam lingkup FIS yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh studi di UNM;
3. Bapak Dr. Najamuddin M.Hum selaku Pembantu Dekan III sekaligus Pembimbing Satu yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat serta bimbingan kepada penulis hingga penyelesaian akhir studi;

4. Bapak Dr. Patahuddin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan sekaligus sebagai Pembimbing Dua yang telah banyak memberikan waktu luang untuk membimbing penulis dalam penyelesaian studi;
5. Bapak Drs. La Malihu, M.Hum dan Bapak Dr. Ahmadin M.Pd selaku Penguji Satu dan dua yang kemudian banyak meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan wawasan dan pengetahuannya selama penulis menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Sejarah;
7. Untuk yang paling berpengaruh dan yang terpenting dalam hidupku, kedua orang tuaku Ayahanda Muh. Saleh Rusmin dan Ibunda Ramiyani yang telah memberikan kasih dan sayang yang tiada habis-habisnya, dukungan dan lantunan doa yang sangat berarti bagi penulis dalam menggapai cita-cita;
8. Buat saudara saudaraku, Saldi Adh Akbar, Sandi All Akbar, Salni Nirwana dan Sasmita Tungga Dewi serta ipar-iparku yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat. Terimakasih dan sayangku buat kalian;
9. Keponakan-keponakanku yang telah memberikan keceriaan dengan kepolosan mereka yaitu Sayra, Satria, Kasih dan tentunya yang paling kecil Yuzril. Bibi' Ika sayang kalian semua...

10. Buat yang terkasih Agus Santoso yang telah memberikan semangat, doa dan bantuan yang tercurah untukku selama ini. Terimakasih karena sudah mau direpotkan antar sana-sini, dan mendengar curhatanku yang lebih banyak mengeluhnya;
11. Buat seniorku yang pernah singgah dihati Muh. Amran S.Pd, terimakasih atas segala yang pernah dilalui bersama.
12. Buat sahabat-sahabatku tersayang yang cantik-cantik Sri Pribandari, Surya Eka Saputri S.Pd, Surti Al Adawiah, Fitrah Widya Wati S.Pd, Jumaisa S.Pd yang selalu ada dalam suasana apapun itu. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa. Semangat!
13. Buat sepupuku Indra S.Pd terimakasih telah mau direpotkan diawal-awal kuliah;
14. Buat Muh. Irfan dan Yulia Nur Zannah sahabat terbaik yang menemani, menasehati dan melakukan hal-hal gila bersama dalam suasana apapun itu sejak Sekolah Dasar sampai sekarang;
15. Buat teman-temanku yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan Reski Puspitasari, Dian Ekawati, Nirma, Sri Wahyuni Nengsih, Irnasari, Miftahul Jannah, Roslinda, Irdaniah, Irfan Tasnur, syafaat Rahman, Andi Fidriani Saleh dan teman-teman Gerilyawan (angkatan 2012) yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kerjasamanya dan persaudaraan yang kita jalani selama ini;

16. Buat saudara-saudaraku sepenngurusan seperjuangan di Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Periode 2013/2014 dan Periode 2014/2015, suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri pernah bersama kalian;
17. Buat segenap Instansi yang ada di Mamuju dan Mamuju Tengah yang telah meluangkan waktunya mencari dan memberikan data-data yang penulis inginkan;
18. Dan yang terakhir buat segenap pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Aamiin ...

Makassar, September 2016

Penulis

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor: /UN.36.6/PL/2016 untuk membimbing saudara:

Nama : Sartika Ayu Mentari

NIM : 1262041004

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : **Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah 2007-2015**

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan dapat diajukan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Makassar, September 2016

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Najamuddin, M.Hum
Nip.19640723 199203 1 003

Dr. Patahuddin, M.Pd
Nip. 19641231 199003 1 033

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

FIS UNM

Dr. Patahuddin, M.pd
Nip. 19641231 199003 1 033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika Ayu Mentari
NIM : 1262041004
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 21 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah (S1)
Judul Skripsi : **Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah
2007-2015**

Dengan dosen pembimbing masing-masing:

3. Dr. Najamuddin, M.Hum

4. Dr. Patahuddin, M.Pd

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/ luar pengadilan dan menanggung segala resiko dan akibatnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, September 2016

Diketahui oleh :

Ketua Prodi Pendidikan Sejarah

Yang Membuat Pernyataan

Dr. Patahuddin, M.Pd
NIP.19641231 199003 1 003

Sartika Ayu Mentari
NIM. 1262041004

MOTTO

*Mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru dan berusahalah untuk merubah
mimpi itu menjadi kenyataan!!*
(Soichiro Honda)

*Hidup adalah memilih dan dipilih. Berani memilih berani menjalani
konsekuensinya... (Sartika Ayu Mentari, 2016)*



*Kupersembahkan karya ini sebagai salah satu bukti cinta dan sayangku kepada
kedua orang tuaku, kakak-kakakku, adikku dan semua pihak yang telah
membantu yang telah menjadi motivasi dan inspirasi serta tiada henti
memberikan dukungan do'anya buatku...*
(I love you all)

ABSTRAK

Sartika Ayu Mentari, 2016. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (2007-2015). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Najamuddin dan Patahuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Mamuju Tengah, latar belakang munculnya gagasan pembentukan, proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dan kondisi Mamuju Tengah setelah menjadi sebuah Kabupaten. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan sejarah melalui tahapan-tahapan kerja historis yang meliputi: Heuristik (pengumpulan data), Kritik ekstern dan kritik intern, Interpretasi dan Historiografi (penulisan) yang merupakan tahapan akhir pengungkapan kisah sejarah secara tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah karena rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat yang ada di daerah Mamuju Tengah teramat jauh sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lambannya pelayanan pembangunan dan lambannya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Perjuangan masyarakat dan pemerintah yang begitu panjang sejak tahun 1963 menuai hasil pada tanggal 14 Desember 2012 dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Tobadak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat dengan Penjabat Bupati sementara Junda Maulana.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah sebenarnya sudah lama diwacanakan dan kemudian baru dapat terealisasi dengan diresmikannya secara sah pada tahun 2012 yang disambut baik oleh segenap kalangan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa karena hanya hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan. Tak lupa pula salawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Penulis pun senantiasa menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. sehingga melalui kesempatan ini pula penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari segenap pembaca demi penyempurnaan selanjutnya. Selama dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang begitu berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

19. Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
20. Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan para Pembantu Dekan serta staf dalam lingkup FIS yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh studi di UNM;
21. Bapak Dr. Najamuddin M.Hum selaku Pembantu Dekan III sekaligus Pembimbing Satu yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat serta bimbingan kepada penulis hingga penyelesaian akhir studi;

22. Bapak Dr. Patahuddin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan sekaligus sebagai Pembimbing Dua yang telah banyak memberikan waktu luang untuk membimbing penulis dalam penyelesaian studi;
23. Bapak Drs. La Malihu, M.Hum dan Bapak Dr. Ahmadin M.Pd selaku Penguji Satu dan dua yang kemudian banyak meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penulisan skripsi ini;
24. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan wawasan dan pengetahuannya selama penulis menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Sejarah;
25. Untuk yang paling berpengaruh dan yang terpenting dalam hidupku, kedua orang tuaku Ayahanda Muh. Saleh Rusmin dan Ibunda Ramiyani yang telah memberikan kasih dan sayang yang tiada habis-habisnya, dukungan dan lantunan doa yang sangat berarti bagi penulis dalam menggapai cita-cita;
26. Buat saudara saudaraku, Saldi Adh Akbar, Sandi All Akbar, Salni Nirwana dan Sasmita Tungga Dewi serta ipar-iparku yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat. Terimakasih dan sayangku buat kalian;
27. Keponakan-keponakanku yang telah memberikan keceriaan dengan kepolosan mereka yaitu Sayra, Satria, Kasih dan tentunya yang paling kecil Yuzril. Bibi' Ika sayang kalian semua...

28. Buat yang terkasih Agus Santoso yang telah memberikan semangat, doa dan bantuan yang tercurah untukku selama ini. Terimakasih karena sudah mau direpotkan antar sana-sini, dan mendengar curhatanku yang lebih banyak mengeluhnya;
29. Buat seniorku yang pernah singgah dihati Muh. Amran S.Pd, terimakasih atas segala yang pernah dilalui bersama.
30. Buat sahabat-sahabatku tersayang yang cantik-cantik Sri Pribandari, Surya Eka Saputri S.Pd, Surti Al Adawiah, Fitrah Widya Wati S.Pd, Jumaisa S.Pd yang selalu ada dalam suasana apapun itu. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa. Semangat!
31. Buat sepupuku Indra S.Pd terimakasih telah mau direpotkan diawal-awal kuliah;
32. Buat Muh. Irfan dan Yulia Nur Zannah sahabat terbaik yang menemani, menasehati dan melakukan hal-hal gila bersama dalam suasana apapun itu sejak Sekolah Dasar sampai sekarang;
33. Buat teman-temanku yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan Reski Puspitasari, Dian Ekawati, Nirma, Sri Wahyuni Nengsih, Irnasari, Miftahul Jannah, Roslinda, Irdaniah, Irfan Tasnur, syafaat Rahman, Andi Fidriani Saleh dan teman-teman Gerilyawan (angkatan 2012) yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kerjasamanya dan persaudaraan yang kita jalani selama ini;

34. Buat saudara-saudaraku sepengurusan seperjuangan di Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Periode 2013/2014 dan Periode 2014/2015, suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri pernah bersama kalian;
35. Buat segenap Instansi yang ada di Mamuju dan Mamuju Tengah yang telah meluangkan waktunya mencari dan memberikan data-data yang penulis inginkan;
36. Dan yang terakhir buat segenap pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Aamiin ...

Makassar, September 2016

Penulis

ABSTRAK

Sartika Ayu Mentari, 2016. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (2007-2015). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Najamuddin dan Patahuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Mamuju Tengah, latar belakang munculnya gagasan pembentukan, proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dan kondisi Mamuju Tengah setelah menjadi sebuah Kabupaten.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan sejarah melalui tahapan-tahapan kerja historis yang meliputi: Heuristik (pengumpulan data), Kritik ekstern dan kritik intern, Interpretasi dan Historiografi (penulisan) yang merupakan tahapan akhir pengungkapan kisah sejarah secara tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah karena rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat yang ada di daerah Mamuju Tengah teramat jauh sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lambannya pelayanan pembangunan dan lambannya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Perjuangan masyarakat dan pemerintah yang begitu panjang sejak tahun 1963 menuai hasil pada tanggal 14 Desember 2012 dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Tobadak, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat dengan Penjabat Bupati sementara Junda Maulana.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah sebenarnya sudah lama diwacanakan dan kemudian baru dapat terealisasi dengan diresmikannya secara sah pada tahun 2012 yang disambut baik oleh segenap kalangan masyarakat.

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Wilayah Administratif dan Luas Wilayah Per Desa/UPT Kecamatan Tobadak	19
2.	Wilayah Administratif dan Luas Wilayah Per Desa/UPT Kecamatan Pangale	19
3.	Wilayah administratif dan Luas Wilayah Per Desa/UPT Kecamatan Budong-budong	20
4.	Wilayah Administratif dan Luas Wilayah Per Desa/UPT Kecamatan Topoyo	21
5.	Wilayah Administratif dan Luas Wilayah per Desa/UPT Kecamatan Karossa	21
6.	Batas Wilayah Administratif Perkecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah	22
7.	Posisi dan Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten MamujuTengah	23
8.	Nama Sungai di Kabupaten Mamuju Tengah	24
9.	Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2012-2014	26
10.	Banyaknya Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2012-2014	27
11.	Jarak Ibukota Kecamatan di Mamuju Tengah dengan Ibukota Kabupaten Mamuju	32
12.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2014	56
13.	Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah dari Tahun 2012-2014	57
14.	Banyak Sekolah, Murid, dan Guru di Kabupeten Mamuju Tengah Tahun 2012-2014	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu masalah yang rumit, sehingga manusia sebagai pelaksana pembangunan dituntut harus memiliki keahlian yang akan mendukung pembangunan. Tanpa memiliki keahlian, maka pelaksanaan dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sudah barang tentu, pembangunan sebagai perubahan sosial tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, melainkan menyangkut segenap aspek kehidupan bangsa.¹

Keberhasilan suatu pembangunan tidak akan terlepas dari rencana pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menyusun rencana pembangunan perlu diketahui kondisi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah dari waktu ke waktu. Hal ini penting karena memahami perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah setidaknya dapat menjadi pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk menumbuhkan dan menciptakan rasa kesetiakawanan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang ditempuh melalui kegiatan pembangunan. Pembangunan dalam hal ini pembangunan manusia ialah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi

¹ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas)*, (Jakarta: PT Bina Aksara. 1987), hlm 11

penduduk.² Dalam proses pelaksanaan pembangunan, kesadaran sejarah sangat penting artinya dalam membantu dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Perkembangan belakangan ini masyarakat Indonesia telah mulai menaruh perhatian besar terhadap perjalanan sejarahnya sebagai cerita bangsanya di masa lalu. Kenyataan tersebut sudah nampak jelas dengan munculnya berbagai hasil karya yang tercakup dalam kajian sejarah antara lain Sejarah Kota, Sejarah Ekonomi, Sejarah Sosial dan tema-tema yang lain. Adanya pemahaman bahwa sejarah lokal merupakan bahan pelengkap Sejarah nasional, maka harus disadari betapa pentingnya mengungkapkan sejarah lokal dengan baik dan yang sebenarnya sehingga dapat merencanakan langkah-langkah di masa yang akan datang.³ Oleh karena itu sejarah harus dipelajari dalam rangka membangun bangsa menuju cita-cita nasional. Salah satu tema sejarah lokal yang masih jarang disentuh oleh para penulis adalah mengenai sejarah otonomi daerah. Padahal tema ini bagi penulis amatlah penting pengungkapannya, utamanya pada saat sekarang ini.

Pelaksanaan otonomi daerah di era sekarang ini telah banyak memberikan dampak kepada masyarakat, terutama pada peningkatan kesejahteraan mereka lewat pemekaran wilayah. Hal ini seiring dengan keinginan beberapa daerah otonom untuk mengembangkan wilayahnya dengan cara membentuk daerah otonom baru. Pengembangan daerah otonom baru, berfokus pada ikhtiar yang berlandaskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam

² Muh. Amran, Ujung Pandang: Kajian Sejarah Perluasan Ruang Kota Makassar, *Skripsi*. (Makassar: FIS UNM, 2015), hlm. 5

³ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1978), hlm.15

kenyataanya bahwa kadar kedekatan suatu komunitas dengan pusat pemerintah terkait erat dengan laju pertumbuhan komunitas tersebut. Ada kecenderungan bahwa akselerasi pembangunan berpusat disekitar pusat pemerintahan, sehingga praktis terjadi suatu ketimpangan, baik fisik maupun non fisik pada wilayah ibu kota, maupun wilayah wilayah kecamatan lainnya.⁴ Kesenjangan ini oleh masyarakat cukup dipahami oleh karena rentang kendali pemerintahan yang luas.

Bertolak dari kesadaran akan pentingnya pengungkapan sejarah lokal, utamanya yang menyinggung tentang otonomi daerah, yang kemudian berujung pada pemekaran wilayah di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Mamuju. Pemekaran Kabupaten Mamuju menjadi Kabupaten Mamuju Tengah berangkat dari kenyataan bahwa rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat yang ada di Mamuju Tengah sangat jauh, lambannya pemerataan pembangunan, lambannya pembangunan kemasyarakatan dan lambannya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan diatas maka seluruh komponen masyarakat setempat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, agar diberikan kesempatan untuk mengatur nasibnya dalam

⁴ Purnawati, Pembentukan Kabupaten Toraja Utara 2001-2009. *Skripsi*. (Makassar: FIS UNM. 2009), hlm.3

bentuk kabupaten baru yang lepas dari kabupaten induk menuju Kabupaten Mamuju Tengah.

Kabupaten Mamuju adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju merupakan pusat dari segala aktifitas baik aktifitas ekonomi, maupun pemerintahan, dalam hal ini pusat pemerintahan tentunya berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksudkan disini adalah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh masing-masing daerah misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, pembuatan akte kelahiran dan aktifitas pelayanan publik lainnya. Jarak yang ditempuh dari Kecamatan Tobadak (ibukota Kabupaten Mamuju Tengah sekarang) sangatlah jauh, selain itu prasarana jalan raya yang dilalui sangat berbahaya, sehingga masyarakat yang ingin mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi membutuhkan waktu yang banyak. Selain jarak tempuh yang jauh kinerja pelayanan public juga kurang memuaskan, hal ini masih berlaku hingga sekarang, misalnya seseorang yang ingin membuat SIM C harus menunggu lebih dari satu hari bahkan bisa menjadi beberapa hari.

Jauhnya jarak tempuh dan lain sebagainya maka hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat bagian Mamuju Tengah untuk membentuk satu daerah baru. Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dilegitimasi dalam berbagai perangkat Undang-Undang. Pemberian otonomi yang nyata dapat dilihat dalam Pasal 5 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah
2. Pembentukan, nama, batas dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang
3. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
4. Syarat- syarat pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah ini mengacu kepada kedua kebutuhan pokok yaitu pertama, ingin mempercepat pelaksanaan dan pemerataan pembangunan. Kedua untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat. Namun demikian gagasan mengenai pembentukan kabupaten baru ini tidak terlepas pula dari unsur politik.

Tahun 2007 lahir sebuah gagasan tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan salah satunya adalah dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju No. 17 Tahun 2007 Tanggal 31 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Pembentukan dan pemekaran daerah merupakan implikasi dari diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 oleh DPR, inti dari Undang-

⁵ Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang ini adalah untuk mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang mengutamakan asas desentralisasi. Hal ini yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dari dimensi sejarahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum Mamuju Tengah?
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah?
3. Bagaimana proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah?
4. Bagaimana kondisi Mamuju Tengah setelah menjadi sebuah kabupaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis diatas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Mamuju Tengah
2. Untuk mengetahui latarbelakang munculnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah
3. Untuk mengetahui proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah
4. Untuk mengetahui kondisi Mamuju Tengah setelah menjadi sebuah kabupaten

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam merekonstruksi sejarah pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Untuk bahan referensi dalam penulisan sejarah lokal Kabupaten Mamuju Tengah khususnya dan Sulawesi Barat pada umumnya.
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar bisa berkontribusi secara positif terhadap pembangunan daerah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul dan uraian permasalahan diatas, maka kajian dalam proposal penelitian skripsi ini secara tematik nantinya akan difokuskan pada latar belakang dan proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang memisahkan diri dari Kabupaten Mamuju. Secara spasial penelitian ini akan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah dan sekitarnya dengan wilayah yang menjadi proses pembentukan/pemekaran wilayahnya.

Batasan temporalnya dimulai pada tahun 2007 dan diakhiri tahun 2015. Pembahasan dimulai tahun 2007 karena pada tahun itu telah dituangkannya aspirasi masyarakat salah satunya dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju No. 17 Tahun 2007 Tanggal 31 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya, pembahasan diakhiri tahun 2015 adalah untuk meninjau keadaan Mamuju Tengah setelah menjadi sebuah kabupaten.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Permasalahan pembangunan dewasa ini menjadi perhatian serius dari pemerintah disemua wilayah. Pembangunan ini bisa dilaksanakan melalui pemekaran wilayah. Pemekaran dan pembentukan kabupaten baru telah banyak ditulis dalam sebuah skripsi seperti: Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat oleh Suhaemi⁶ yang terdapat di Perpustakaan Pendidikan Sejarah UNM, inti dari tulisan diatas adalah semua berawal dari aspirasi masyarakat yang proses perjuangannya membutuhkan waktu dan rencana yang terorganisir, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan mengupayakan percepatan pembangunan disemua sektor kehidupan.

Tahun 2007 lahir sebuah gagasan tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan salah satunya adalah dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju No. 17 tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan tempat dilaksanakannya pemekaran. Walaupun penelitian ini akan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah yang lain yang terkait, baik secara

⁶ Suhaemi. Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat 2008. *Skripsi*. (Makassar: FIS UNM, 2013). Hlm. 25

langsung maupun tidak langsung menyangkut pemekaran/pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah juga akan dijadikan sebagai objek dari penelitian sepanjang itu dianggap perlu dan diketahui menyimpan informasi penting yang berkaitan erat dengan topik dari penelitian. Misalnya di beberapa wilayah yang dijadikan sebagai batas-batas dari pemekaran daerah dan sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian skripsi ini dapat dikategorikan kedalam jenis penelitian sejarah atau secara lebih khusus bagi penelitian sejarah atau sejarah lokal. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah juga metode sejarah.

Metode penelitian sejarah berbeda dengan metode penelitian ilmu-ilmu lain. Menurut Garraghan Metode sejarah adalah seperangkat asas dan kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis dari hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.⁷ Atau dapat juga dikatakan bahwa metode sejarah disini adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁸

Metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. Istilah metode dalam arti metode sejarah hendaknya diartikan yang lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisis kritis saja, melainkan juga meliputi usaha sintesa daripada data yang ada sehingga

⁷ Muh. Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2008)

⁸ Louis Gotsschalk. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975). hlm 32

mejadi penyajian kisah sejarah yang dapat dipercaya.⁹metode sejarah ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian-kejadian yang ada pada masa lampau. Terdapat empat tahapan dalam metode sejarah, namun sebelum masuk diempat tahapan tersebut ada tahap yang harus dilalui yaitu tahap pemilihan topik. Keempat tahapan dalam metode sejarah adalah heuristik, kritik yang terbagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern, interpretasi, dan yang terakhir adalah penulisan atau historiografi.

3. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang biasanya berupa catatan-catatan dan arsip yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses sebuah penulisan. Pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengarahkan penulis pada pencarian dan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah atau objek yang sedang diteliti atau ditulis. Berikut ini adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data.

a. Kepustakaan

⁹ Tim Pengajar Pendidikan Sejarah. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Makassar: UNM, 2012). Hlm. 37

Tahap ini penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dengan cara mengkaji arsip, dokumen-dokumen yang digunakan selama proses pembentukan Mamuju Tengah, seperti surat-surat rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Mamuju, Undang-Undang dan Peraturan Daerah sebagai landasan Yuridis terhadap pembentuka Mamuju Tengah. Selain itu peninjauan kepustakaan pada referensi-referensi yang mendukung seperti dalam buku, sumber internet, artikel dan penelitian terdahulu oleh peneliti lain yang terkait dengan kajian penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian menggunakan cara ini ditempuh dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara.

1). Observasi

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi/ keterangan yang diperoleh sebelumnya . Sebagai metode ilmiah observasi tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁰ Dengan melakukan observasi penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Cara ini dilakukan dengan langsung melakukan pengamatan pada objek penelitian yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dan tempat lain yang berhubungan

¹⁰ <http://mastarmudi.blogspot.com>. pengertian observasi (Diakses 25 Januari 2016)

dengan topik penelitian. Alat bantu yang dapat digunakan dalam kegiatan observasi ini adalah kamera merk Canon tipe A2300 yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan merekam apa yang didapatkan dalam proses observasi. Selain itu dapat pula menggunakan alat bantu handphone yang kegunaanya hampir sama dengan kamera.

2). Wawancara

Sumber lisan dalam penulisan sejarah sangatlah membantu dimana penulis berinteraksi secara langsung dengan sumber, yaitu informan. Sumber lisan dengan tehknik ini menjadi langkah yang tepat karena dengan hal demikian peneliti secara langsung tahu dan aktif dalam pengumpulan data. Sumber lisan yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa pelaku yang turun langsung dalam proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang berkaitan dengan objek penelitian seperti wawancara langsung dengan Bupati terpilih Kabupaten Mamuju Tengah, para wakil pemerintahan dan para tokoh masyarakat. Wawancara ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu maupun wawancara langsung yang dalam artian tidak menggunakan pedoman wawancara. Untuk melakukan wawancara akan terlebih dahulu menetapkan waktu dan tempat proses wawancara akan berlangsung hal ini dimaksudkan agar wawancara mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa tujuan dari diadakannya

wawancara. Sebaiknya pula pada saat melakukan wawancara alat bantu yang digunakan punya hanya pulpen dan kertas akan tetapi juga harus mempersiapkan alat perekam lainnya seperti kamera digital maupun handphone, hal ini untuk menghindari apabila ada informasi yang tidak sempat dicatat selama proses wawancara.

5. Teknik Analisi Data

Langkah selanjutnya ditempuh setelah pengumpulan data adalah menganalisa sumber tersebut melalui kritik dan interpretasi.

a. Kritik

Kritik ini dilakukan untuk menyelidiki apakah sumber yang didapat itu asli baik dari segi bentuk maupun isinya. Kritik terbagi atas dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik eintern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menentukan apakah sumber yang didapat valid, asli, dan bukan tiruan, sumber tersebut utuh dalam arti belum berubah baik bentuk maupun isinya. Sedangkan kritik intern adalah kritik yang dilakukan dengan memperhatikan dua hal, yakni penilaian intrinstik terhadap sumber-sumber dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya).¹¹ Menurut Gotschalk terjemahan Nugroho Notosusanto sebagai berikut :

Setelah menetapkan sebuah teks autentik dan menemukan sungguh-sungguh yang hendak dikatakan pengarang, maka sejarawan baru menetapkan apakah kesaksian itu kredibel dan jika memang demikian, sejauh mana itu merupakan masalah bagi kritik intern.¹²

¹¹ Sugeng Priyadi. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2012). Hlm. 67

¹²Louis Gottschlak. *Op.Cit.* Hlm. 94

Keabsahan suatu sumber dapat diketahui dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dalam masalah yang sama. Hasil dari kritik sejarah tersebut, baik kritik ekstern maupun kritik intern dihadapkan pada data yang akurat.

b. Interpretasi

Setelah dilakukan kritik sumber, langkah selanjutnya adalah penafsiran atau proses pemaknaan sebuah fakta sejarah. Fakta sejarah ini harus ditafsirkan sehingga antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dapat disatukan atau dipilih sehingga dapat direkonstruksi dengan baik. Dalam interpretasi seringkali unsur subyektifitas seorang penulis muncul didalam tulisannya. Hal ini tidak dapat dihindarkan, akan tetapi sebaiknya lebih ditekankan kepada apa yang memang telah didapatkan di dalam penelitian. Melalui penafsiran fakta ini dapat menjadi satu kesatuan yang harmonis, sehingga sejarah pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah 2007-2015 dapat dihadirkan kepermukaan sesuai dengan konteksnya.

6. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi adalah cara untuk menyampaikan dalam bentuk tertulis, apa yang dalam pikiran peneliti diketahuinya mengenai masa lampau. Penyampaian secara efisien dan efektif dalam menulis sejarah mengharuskan untuk membeberkan apa yang diketahuinya menurut suatu prinsip koherensi.¹³ Tahap ini

¹³ Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. (Jakarta: YIIS dan LEKNAS-LIPI, 1985). Hlm. 261

merupakan tahap akhir dari metode penelitian sejarah. Suatu interpretasi yang tertentu tidak dapat dihindari oleh seorang penulis, seorang penulis harus melepaskan pikiran bahwa dapat mengahdapi data historis dengan pikiran yang bersih dan menangkap fakta sejarah dalam keadaan yang sebenarnya.¹⁴ Dalam tahapan ini peneliti akan mengungkapkan dan memahami kenyataan dari sebuah sejarah sebagaimana mestinya. Penulisan ini akan disusun secara kronologis menurut urutan waktu, dan tetap tidak keluar dari fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan. Dalam tahap ini ilmu sejarah tidak dapat berdiri sendiri, ilmu sejarah membutuhkan ilmu lain sebagai ilmu bantu dalam menulis fakta sejarah.

BAB II

¹⁴ Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. (Yogyakarta: Ombak, 2014). Hlm. 83

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada Lintang Selatan 2' 05' 52' ' dan Bujur Timur 119' 20' 93' ', memiliki luas wilayah $\pm 301.437,01 \text{ Km}^2$, terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) desa, yaitu :

1. Kecamatan Tobadak, 8 (delapan) desa meliputi Desa Tobadak, Desa Mahahe, Desa Polongaan, Desa Batu Parigi, Desa Sulobaja, Desa Bambadaru, Desa Saloadak, dan Desa Sejati;
2. Kecamatan Pangale, terdiri dari 9 (sembilan) Desa yaitu Desa Polo Lereng, Desa Polo Pangale, Desa Pangale, Desa Kuo, Desa Polo Camba, Desa Sartana Maju, Desa Lamba Lamba, Desa Kombiling, dan Desa Lemo-Lemo;
3. Kecamatan Budong-Budong, 11 (sebelas) Desa adalah Desa Babana, Desa Kire, Desa Salumanurung, Desa Tinali, Desa Salugatta, Desa Pontanakayang, Desa Bojo, Desa Pasapa, Desa Barakkang, Desa Lumu, dan Desa Lembah Hada;
4. Kecamatan Topoyo, 15 (lima belas) Desa yaitu Desa Topoyo, Desa Tabolang, Desa Tangkau, Desa Pangalloang, Desa Tumbu, Desa Salupangkang, Desa Salupangkang IV, Desa Paraili, Desa Wae Puteh, Desa Tappilina, Desa Salule'bo, Desa Kabubu, Desa Budong-Budong, Desa Bambamanurung, dan Desa Sinabatta; dan
5. Kecamatan Karossa, terdiri dari 13 (tiga belas) Desa termasuk 2 (dua) UPT meliputi Desa Karossa, Desa Kayu Calla, Desa Kadaila, Desa Benggaulu, Desa Lemba Hopo, Desa Sanjango, Desa Lara, Desa Salubiro, Desa Tasokko, Desa Kambunong, Desa Suka Maju, UPTD Mora IV, dan UPTD Lara III. ¹⁵

¹⁵ Badan Pusat Statistik. *Mamuju Tengah Dalam Angka 2013*. (Mamuju Tengah: BPS, 2013)

Diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Karossa merupakan kecamatan terluas, dengan luas wilayah hampir 40 persen dari total luas wilayah kabupaten. Kecamatan Pangale merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengenai batas-batas wilayah, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pembentukannya, Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan wilayah dengan topografi yang bervariasi. Dibagian barat merupakan wilayah pesisir pantai yang berhubungan langsung dengan Selat Makassar. Sedangkan dibagian timur sebagian besar merupakan daerah perbukitan. Secara umum, wilayah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki ketinggian 0 – 600 dpl (di atas permukaan laut). Wilayah yang tertinggi terdapat di Kecamatan Pangale dengan ketinggian mencapai 600 dpl. Juga terdapat 3 gunung yang terletak di Kecamatan Budong-Budong yaitu Gunung Pasapa, Gunung Tanette Tangga, dan Gunung Sukar.

Jarak antara ibukota kecamatan dengan kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah relatif dekat. Adapun jarak terjauh dari ibukota Kecamatan Topoyo ke Kecamatan Karossa, yaitu 56 Km, kemudian ke Kecamatan Tobadak 43 Km, ke Kecamatan Pangale 25 Km, dan terdekat ke ibukota Kecamatan Budong-Budong yang berjarak 13 Km. Selanjutnya jarak dari ibukota Kabupaten Mamuju Tengah ke Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sejauh 128 Km. Adapun jarak ke ibukota kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, kabupaten tetangga, Kabupaten Mamuju Utara sejauh 161 Km, Kabupaten Majene sejauh 258 Km, Kabupaten Polewali Mandar 314 Km, dan Kabupaten Mamasa 407 Km.

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Perdesa/ UPT Kecamatan Tobadak

No	Nama Desa/UPT	Luas (Ha)
1	Sulobaja	2.232,43
2	Bambadaru	1.861,35
3	Batu Parigi	24.925,45
4	Polongaan	3.661,04
5	Mahahe	481,34
6	Tobadak	10.231,48
7	Salo Adak	5.627,91
8	Sejati	14.560,00
	Kecamatan Tobadak	63.581,01

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015

Dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Tobadak yang memiliki luas daerah terbesar adalah Desa Batu Parigi dengan luas 24.925,45 Ha. Sedangkan desa terkecil adalah Desa Bambadaru dengan luas 1.861,35 Ha.

Tabel 2.2 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Per Desa/ UPT Kecamatan Pangale

No	Nama Desa/UPT	Luas(Ha)
----	---------------	----------

1	Pangale	1.476,88
2	Sartanamaju	1.037,75
3	Polo Pangale	1.444,77
4	Kuo	1.235,00
5	Polo Lereng	2.073,43
6	Polo Camba	1.036,72
7	Lamba-lamba	1.207,60
8	Kombiling	301,38
9	Lemo-lemo	753,97
	Kecamatan Pangale	11.568,54

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pangale dengan luas wilayah seluas 11.568,54 Ha memiliki desa sebanyak 9 desa dengan desa terluas adalah Desa Polo Lereng seluas 2.073,43 Ha dan desa terkecil adalah Desa Kombiling dengan luas 301,38 Ha.

Tabel 2.3 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Per Desa/ UPT

Kecamatan Budong-budong

No	Nama Desa/UPT	Luas (Ha)
1	Lumu	1.532,10
2	Tinali	372,02
3	Salumanurung	1.486,26
4	Kire	3.156,65
5	Salogatta	1.425,34
6	Pontanakayang	3.446,12
7	Babana	4.217,68
8	Pasappa	1.923,93
9	Bojo	5.234,68
10	Barakkang	1.347,19
11	Lembah Hada	353,31
	Kecamatan Budong-budong	24.477,28

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015

Kecamatan Budong-budong memiliki luas wilayah yaitu seluas 24.477,28 Ha dengan desa terluas adalah Desa Bojo dengan luas 5.234,68 Ha dan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Lembah Hada seluas 353,31 Ha.

Tabel 2.4 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

Per Desa/ UPT Kecamatan Topoyo

No	Nama Desa/UPT	Luas (Ha)
1	Budong-budong	1.067,10
2	Paraili	998,02
3	Topoyo	773,75
4	Kabubu	454,90
5	Waeputeh	1.311,56
6	Tappilina	989,51
7	Tangkou	531,42
8	Tabolang	2.918,58
9	Salupangkang	1.021,40
10	Salupangkang IV	924,68
11	Tumbu	1.934,39
12	Bambanurung	589,88
13	Pangalloang	1.827,04
14	Sinabatta	2.169,28
15	Salulekbo	74.943,64
	Kecamatan Topoyo	92.456,21

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015

Pada wilayah Kecamatan Topoyo wilayah desa terecil ada pada Desa Kabubu denga luas wilayah 454,90 Ha. Sedangkan desa dengan luas wilayah terluas adalah Desa Salulekbo seluas 74.943,64 Ha.

Tabel 2.5 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
Per Desa/ UPT Kecamatan Karossa

No	Nama Desa/UPT	Luas (Ha)
1	Kambunong	16.493,88
2	Tasokko	16.842,61
3	Lara	17.436,30
4	Karossa	26.941,95
5	Lembah Hopo	8.991,95
6	UPT Lara III	310,30
7	Banggaulu	1.241,20
8	Kayu Calla	1.309,40
9	Kadaila	840,59
10	Sukamaju	1.475,60
11	Sukamaju	1.084,61
12	Salubiru	11.555,99
13	Sanjango	4.829,33
	Kecamatan Karossa	109.353,97

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015

Kecamatan Karossa yang juga merupakan Kecamatan terluas di Mamuju Tengah dengan luas 109.353,97 Ha, mempunyai 13 desa dengan desa terluas adala Desa Karossa dengan luas wilayah 26.941,95 Ha. Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa UPT Lara III dengan luas wilayah 310,30 Ha.

Tabel 2.6 Batas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten
Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Batas wilayah			
		Utara	Selatan	Barat	Timur
1	Topoyo	Kec. Karossa	Kec. Tobadak	Selat Makassar	Prov. Sulsel
2	Budong–budong	Kec. Topoyo	Kec. Pangale	Selat Makassar	Kab Mamuju
3	Tobadak	Kec.	Kab. Mamuju	Kec.	Prov.

		Tobadak		Budong-budong	Sulsel
4	Pangale	Kec. Budong-budong	Kab. Mamuju	Selat Makassar	Kab. Mamuju
5	Karossa	Kab. Mamuju Utara	Kec. Topoyo	Selat Makassar	Prov. Sulsel

Sumber: Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015

B. Keadaan Topografi

Bagian wilayah dengan kemiringan lereng antara 0 – 2 % seluas 62.936,98 Ha; 2- 5 % seluas 13.190,77 Ha; 5 – 15 % seluas 38.544,73 Ha; 15 – 40 % seluas 144.055,16 Ha; dan besar dari 40 % seluas 29.734,70 Ha. Luas terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Budong-Budong, yakni 30.048 Ha. Sedang untuk kemiringan lereng antara 2 - 15 % terdapat di Kecamatan Tobadak seluas 25.066 Ha. Jika dicermati konfigurasi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah menurut kemiringan lereng, maka bagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit. Secara proporsional, ketinggian wilayah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Posisi dan Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Kecamatan	Bujur	Lintang	Tinggi DPL
1	Topoyo	119 ⁰ 17' 07''	2 ⁰ 04'05''	0-500
2	Budong – Budong	119 ⁰ 11' 87''	2 ⁰ 04' 66''	0-500
3	Tobadak	119 ⁰ 20'93''	2 ⁰ 05'52''	0-500
4	Pangale	119 ⁰ 08'13''	2 ⁰ 17'31''	0-600
5	Karossa	119 ⁰ 24'08''	1 ⁰ 47'82''	0-500

Sumber: BPS Mamuju Tengah Tahun 2014

Ditinjau dari aspek ketinggian wilayah, Kabupaten Mamuju Tengah dapat dibedakan menjadi 4(empat) zona masing-masing zona dengan ketinggian antara 0 – 25m, zona antara 25m – 100m, zona dengan ketinggian antara 100m – 500m, zona dengan ketinggian 500m – 1.000m. Secara umum berdasar zona ketinggian di atas menunjukkan bahwa pada Bagian Selatan sebagian besar mempunyai ketinggian di atas 500 m, sedang semakin ke utara ketinggiannya semakin meningkat rata-rata sampai dengan 500 m.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui oleh 7 sungai yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut adalah S. Budong-budong, S. Lumu, S. Karama, S. Karosa, S. Benggaulu, S. Kamansi, dan S. Panggajoran. Dalam sistem kerja wilayah sungai, sungai-sungai di Kabupaten Mamuju Tengah ini termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Karama, yang meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS karossa. Luas masing-masing DAS menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Nama Sungai di Kabupaten Mamuju Tengah

Nama DAS	Sebaran das pada masing-masing kecamatan (ha)					Luas (Ha)
	Kecamatan					
	Budong- budong	Karossa	Pangale	Tobadak	Topoyo	
Karossa	-	21.233,22	-	-	-	21.233,22
Benggaulu	-	10.192,05	-	-	-	10.192,05
Budong- Budong	6.708,86	77.945,53	-	28.643,89	90.964,37	204.262,65
Panggajoan	1.041,92	-	-	-	-	1.041,92
Kamansi	2.412,35	-	-	-	-	2.412,35
Lumu	14.061,02	-	6.724,38	22.055,65	536,70	43.377,75
Karama	-	-	5.142,05	13.439,41	335,60	18.917,07
Total	24.224,15	109.370,80	11.866,43	64.138,95	91.836,68	301.437,00

Sumber: Lampiran Kepres Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Wilayah Sungai

Hingga saat ini sungai-sungai tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena di wilayah ini belum banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang banyak membutuhkan air baku dari badan air permukaan yang ada. Kondisi badan air permukaan di wilayah ini semakin terancam dengan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian rakyat di daerah tengah dan hulu DAS. Indikasi kerusakan DAS ini terbukti dengan seringnya terjadi banjir pada saat musim hujan. Oleh karena itu penataan daerah aliran

sungai di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan wilayah kabupaten sekitarnya sangatlah mendesak.

C. Keadaan Demografi

Keadaan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki jumlah kepadatan penduduk yang berbeda di setiap kecamatan. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Mamuju Tengah didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan pada tahun ini seiring dengan perkembangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai sebuah kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu sekitar 2,27 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kabupaten termuda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tingkat kepadatan penduduk yakni sebesar 39 jiwa/ Km^2 pada tahun 2012 atau dalam setiap Km^2 ditempati penduduk sekitar 39 orang. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2012, *sex ratio* mengalami perubahan yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Untuk melihat kepadatan penduduk dan luas wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah maka dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

**Tabel 2.9 Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2012-2014**

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
			2012	2013	2014
1	Pangale	115,69	11.965	12.534	12.311
2	Budong-budong	244,77	24.247	25.013	25.492
3	Tobadak	635.81	25.232	26.107	26.908
4	Topoyo	924,56	27.537	28.980	29.271
5	Karossa	1.093,54	23.104	23.605	24.206
	Jumlah	3.014,37	112.085	116.239	118.188

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2013, 2014 dan 2015

Dari tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kecamatan yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kecamatan Topoyo dengan luas 924,56 Km² mempunyai kepadatan penduduk pada tahun 2012 sebanyak 11.965 jiwa dan terus bertambah setiap tahunnya. Adapun kecamatan yang mempunyai penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pangale dengan penduduk sebanyak 11.965 jiwa pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 sebanyak 12.311 jiwa.

D. Agama dan Kepercayaan

Sebagaimana yang tercantum dalam bunyi sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini berarti bangsa Indonesia memiliki agama yang dianut oleh

masyarakatnya. Begitu pula dengan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai agama dan kepercayaan masing masing, untuk dilaksanakan sebagaimana dalam ajaran dan kepercayaannya.

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Mamuju Tengah pada hasil sensus tahun 2013 berjumlah 116.239 jiwa terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Suku – suku yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah ini terdiri dari suku Mandar, Toraja, Bugis, Jawa, Makassar dan suku lainnya. Sedangkan bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa mandar, bugis, toraja, Makassar dan lain-lain. Namun, perlu diketahui karena keragaman bahasa yang ada maka bahasa yang paling umum digunakan adalah bahasa Indonesia.

Pemeluk agama di Kabupaten Mamuju Tengah mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sisanya adalah Kristen baik Protestan maupun Katolik, Hindu, Budha dan lain – lain.¹⁶

Tabel 2.10 Banyaknya Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2012 – 2014

No	Tahun	Agama				
		Islam	Protestan	katolik	Hindu	Budha
1	2012	101.383	3.787	2.865	1.986	1.064
2	2013	103.941	4.716	3.410	2.248	1.198
3	2014	104.413	5.114	3.908	3.017	1.201

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2013, 2014, dan 2015

¹⁶ Azmi, *Sejarah 34 Provinsi Indonesia* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).hlm.383

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Mamuju Tengah mayoritas adalah beragama Islam yang dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan yang signifikan. Penganut agama Islam pada tahun 2014 sebanyak 104.413 jiwa yang disusul oleh agama Protestan sebanyak 5.114 jiwa. Adapun agama yang minoritas adalah agama Budha dengan banyak penganut sebanyak 1.201 jiwa.

Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah sebelum Islam masuk di daerah ini warga masyarakat setempat menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang beranggapan bahwa ada kekuatan gaib yang menghuni dunia ini. Dalam kenyataannya dewasa ini kepercayaan animisme dan dinamisme dalam implikasi pelaksanaannya sudah mulai berkurang. Dan dalam kehidupan sehari-hari kemajemukan penganut agama selalu terlihat kerukunan dan tidak terjadi kesenjangan antar penganut agama masing-masing. Timbulnya kerukunan antar umat beragama disebabkan oleh adanya saling pengertian dan rasa hormat diantara mereka.

E. Kehidupan Sosial dan Budaya

Lahirnya perbedaan golongan dalam masyarakat, pada dasarnya diawali oleh adanya keinginan manusia untuk saling menguasai. Dengan demikian akan muncul perbedaan golongan antara bawahan dan atasan maupun antara pimpinan dan yang dipimpin. Untuk mengetahui latar belakang pandangan hidup suatu masyarakat tertentu yang harus diperhatikan adalah stratifikasi sosialnya.¹⁷ Dewasa ini lapisan-lapisan sosial yang dimaksud nampaknya sudah mulai bergeser sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada tiga lapisan sosial baru yang mulai nampak di Kabupaten Mamuju Tengah yang mayoritas penduduknya adalah suku Mandar. Lapisan lapisan sosial tersebut adalah : 1. Lapisan birokrasi (pegawai negeri, ABRI, dan sarjana), 2.

¹⁷ Harida, Kota Watampone 1991-2003. *Skripsi*. (Makassar: FEIS UNM, 2005). Hlm.17

Lapisan wiraswastawan (pedagang, atau pemilik modal), dan 3. Lapisan rakyat biasa. Lapisan sosial raja maupun bangsawan tinggi tetap mendapat perlakuan lebih.¹⁸ Bagi masyarakat Mandar, mereka mengikuti lingkungan pergaulan hidup parental yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah maupun ibu. Dari segi hak dan kewajiban antara ayah dan ibu mengikuti prinsip bilineal atau garis serba dua. Oleh karena itu ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memikul tanggung jawab urusan ekonomi rumah tangga yang dalam istilah setempat dikenal dengan *siwaliparri*.¹⁹

¹⁸ Basrul, Perkembangan Kabupaten Majene 1960-2000. *skripsi*. (Makassar: Fakultas ekonomi dan ilmu sosial UNM. 2004). Hlm. 23

¹⁹ Harida. Op.Cit. Hlm. 26

BAB III

PEMBENTUKAN MAMUJU TENGAH

A. Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah

Pelaksanaan otonomi daerah di era sekarang ini telah banyak memberikan dampak kepada masyarakat, terutama kepada peningkatan kesejahteraan mereka, melalui pemekaran wilayah. Hal ini seiring dengan cara membentuk daerah otonom baru. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang mulai ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah,²⁰ telah menjadi paradigma baru sistem pemerintahan di Indonesia yang berbeda dengan masa pemerintahan rezim Orde Baru. Undang-undang ini merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 18 (beserta penjelasannya) yang menyimpulkan bahwa sistem kenegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme, melainkan membagi daerah Indonesia atas besar dan kecil, baik yang bersifat otonom maupun daerah administratif.²¹ Pelaksanaan otonomi daerah ini telah memberikan dampak bagi pembagian wilayah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan penambahan jumlah provinsi dan kota/kabupaten. Pada tahun 2013 jumlah provinsi tercatat sebanyak 34 provinsi.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama

²⁰ UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah disahkan pada tanggal 7 Mei 1999, sedang UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. UU No.22 Tahun 1999 adalah pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

²¹ Fatwa, *Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa* (Jakarta: Yarsif Watampone. 2002). Hlm. 3

antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Kabupaten Mamuju yang mempunyai luas wilayah $\pm 8.014,06 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ± 468.783 jiwa terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan dan 154 (seratus lima puluh empat) desa/kelurahan perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pertumbuhan penduduk yang juga tinggi di Kabupaten Mamuju menjadi hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah.²²

Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah sudah dimulai sejak tahun 1963 dengan nama Kabupaten Bupas (Budong-Budong Pasangkayu) yang merupakan gabungan dari dua wilayah yakni wilayah Budong-Budong dan wilayah Pasang Kayu. Namun dalam

²² Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju*. (Mamuju: BPS, 2008). Hlm. 12

perjalanannya, wilayah Pasang Kayu sudah menjadi Kabupaten sendiri terlebih dahulu yakni Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga dengan demikian keinginan membentuk wilayah Budong-Budong menjadi kabupaten sendiri menjadi aspirasi masyarakat yang kuat dari masyarakat setempat.

“Lahirnya gagasan ini pertamakali dibicarakan dalam sebuah perjalanan dari Makassar menuju Mamuju dengan menaiki perahu motor dari kayu. Perjalanan ini menpempuh waktu selama 2 hari 2 malam. Dari hasil pembicaraan maka lahirlah ide untuk membentuk sebuah kabupaten baru, yang dulu namanya adalah Bupas”²³

Luasnya Kabupaten Mamuju menjadikan rentang kendali antarwilayah menjadi lebih panjang. Oleh karenanya pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan memperpendek rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat. Calon daerah otonom Kabupaten Mamuju Tengah ini juga akan menghubungkan antara Kabupaten Mamuju Utara dengan Kabupaten Mamuju yang kemudian akan meningkatkan mobilitas penduduk, arus barang maupun jasa.

Tabel. 3.1 Jarak Ibukota Kecamatan di Mamuju Tengah dengan Ibukota Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Ibukota Kab. Mamuju	Jarak (km)
1	Pangale	Pulo Pangale	Mamuju	90
2	Budong-budong	Babana	Mamuju	102
3	Topoyo	Waeputeh	Mamuju	115
4	Tobadak	Mahahe	Mamuju	128
5	Karossa	Karossa	Mamuju	171

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju Tahun 2007

²³ Wawancara dengan Aruchul Tahir. Pada tanggal 29 Juli 2016 di Mamuju

Dilihat dari tabel di atas maka jarak ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten Mamuju termasuk jauh. Apalagi kecamatan Karossa yang jarak tempuh dengan pusat pemerintahan sejauh 171 Km. Hal ini jelas membuat pelayanan terhadap masyarakat menjadi sangat susah dan tidak merata.

Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

B. Proses Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah

Jauh sebelum wacana tentang pembentukan Mamuju Tengah maka yang pertama-tama dilakukan oleh masyarakat Mandar pada umumnya yaitu untuk membentuk sebuah provinsi baru. Sebagian besar pemekaran kabupaten dilakukan oleh daerah yang hendak membentuk provinsi tersendiri. Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Mamuju Utara misalnya dimaksudkan sebagai dukungan administratif terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.²⁴ Setelah Provinsi Sulawesi Barat diresmikan pada tanggal 22 September 2004 maka langkah selanjutnya adalah melanjutkan cita-cita masyarakat Mandar demi terbentuknya Kabupaten Bupas yang sempat vakum. Sebelum rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat muncul, sebagian golongan menginginkan pembentukan Provinsi Mamuju, hal ini dibuktikan dengan adanya Front

²⁴ Idham & Sapriallah, *Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*, (Surakarta: Zada Haniva. 2010). Hal 186

Perjuangan Pembentukan Provinsi Mamuju (FD3M) yang digelindingkan oleh Salahuddin SR.Sampetoding.²⁵ Rencana pembentukan Provinsi Mamuju dengan menjadikan tiga kabupaten dan satu kotamadya. Kabupaten disini yang dimaksud yaitu Kabupaten Mamuju Selatan, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara serta kotamadya Mamuju. Menindaklanjuti rencana tersebut sosialisasi tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Utara mulai disuarakan ke Pasangkayu yang menjadi ibukota kecamatan.

Pembentukan Povinsi Mamuju bukan satu-satunya rencana pembentukan provinsi yang berdasarkan nama etnis dikawasan Sulawesi Barat. Provinsi Mandar juga merupakan salah satu rencana oleh sebagian golongan dikawasan ini dengan wilayah yang direncanakan adalah bekas wilayah *afdeeling* Mandar. Namun karena keinginan untuk membentuk provinsi yang didalamnya beragam suku bangsa maka rencana tersebut disatukan dalam nama Provinsi Sulawesi Barat.

Sosialisasi tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pun kembali dilakukan oleh Bapak Aruchul Tahir dari Kota Mamuju. Pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2000 ditempat tinggal Ambe Haja. Aruchul Tahir mendorong masyarakat Kecamatan Pasangkayu untuk menjadi satu kabupaten sebagai prasyarat Pembentukan Sulawesi Barat. Sosialisasi ini memberikan harapan kepada penggagas bahwa usaha yang akan mereka lakukan telah mendapat persetujuan dari beberapa pihak.²⁶

²⁵ Muh. Nawawi.”Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat”. *Skripsi* (Makassar: FIS UNM. 2005). Hal. 6

²⁶ Bustan Basir Maras. *Tapak-tapak Perjuangan Berdirinya Mamuju Utara*. (Yogyakarta; Annora Media. 2007). Hal 90

Setelah Kabupaten Mamuju Utara terbentuk maka cita-cita yang semula dikenal dengan Bupas atau Budong-Budong Pasangkayu sudah tidak adalagi, yang tersisa adalah Budong-Budong. Dengan lahirnya gagasan ini, maka banyak tokoh-tokoh masyarakat baik yang ada di Mamuju maupun dari daerah luar yang berkumpul. Pembentukan ini terdiri dari beberapa tahapan.

1. Tahapan Pertama (Tahapan Wacana) Tahun 1963-1964

Tahapan ini adalah tahapan awal dari proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, dimana berkumpulnya para tokoh-tokoh masyarakat dari luar daerah untuk membicarakan lebih lanjut mengenai ide yang telah dibicarakan pada saat perjalanan dari Makassar menuju Mamuju. Adapun tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam tahapan awal ini adalah:

- a. Alm. Mappatunru
- b. Alm. H. Afrijal Pababari
- c. Darwis Hamzah
- d. Drs. H. Ambo Basturi
- e. Alm. H. Aruchul Tahir

Dari hasil pembicaraan ini maka lahirlah ide untuk membentuk sebuah kabupaten baru yaitu gabungan dari Pasangkayu dan Budong-Budong yang kemudian disingkat menjadi Bupas. setelah sampai di Budong-Budong wacana ini di tindaklanjuti di rumah Camat Budong-Budong yaitu Alm. Pababari dan melibatkan tokoh lokal diantaranya adalah Alm. H. Zainuddin, Aziz Anwar, H. Abdul Wahab dan Muh. Yusuf Samar.

Kemudian pembicaraan ini dilanjutkan dengan melibatkan tokoh dari Pasangkayu yaitu H. Andi Pellang dan Radi Ahmad. Wacana yang dirapatkan adalah akan dideklarasikannya Bupas ke publik pada Desember 1964. Kegiatan ini diadakan di taman makam pahlawan dengan melibatkan lagi tokoh dari Pasangkayu yaitu Lazibe dan kepala desa H.Abdursalim. namun sangat disayangkan kegiatan ini tidak mendapatkan hasil apapun dan mengalami kevakuman antara tahun 1964-1998. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Daerah Sulawesi pada waktu masih dikuasai oleh aparat resmi seperti:
 - 1) Di Mamuju oleh Angkatan resmi pasukan Diponegoro
 - 2) Di Budong-Budong oleh pasukan Brimob
 - 3) Di Pasangkayu oleh pasukan Brawijaya
- b. Adanya gangguan dari DI/TII
- c. Belum bisa membuat dukungan resmi dan adanya prokontra dari masyarakat
- d. Belum adanya Undang-Undang mengenai pemekaran

2. Tahapan kedua tahun 1999

Pada tahapan ini juga terjadi momentum reformasi. Munculnya gelombang reformasi pada tahun 1998 merupakan momentum kebangkitan ide pembentukan. Reformasi memberikan semangat baru kepada tokoh-tokoh Mandar dan ingin menghidupkan kembali ide tentang pembentukan Bupas. Ide yang sempat vakum sebagai akibat dari dominasi politik Orde Baru yang sangat anti terhadap ide-ide pemekaran terlebih lagi yang berbasis etnik seperti Mandar. Ide yang sempat terkubur bersama sebagian tokoh penggagasnya. Perubahan politik nasional pasca

kepemimpinan Soeharto memberikan jalan baru bagi perjuangan pembentukan kabupaten ini. Pada tahapan ini telah ada Undang-Undang mengenai pemekaran yaitu UU No. 22 tahun 1999. Oleh karena itu tokoh dari Mandar melakukan rapat di Makassar. Perwakilan dari Mamuju adalah Andi Aji Basuki. Adapun hasil rapat tersebut yaitu ingin membentuk Profinsi Sulawesi Barat terlebih dahulu.

Setelah rapat tersebut, Mamuju tidak mendeklarasikan secara resmi namun membentuk sebuah tim yang bertugas untuk membentuk Mamuju Utara dan Mamuju Tengah, kota Manakarra untuk persiapan daerah timur Kalumpang. Pada tahun 1999 H.Aruchul Tahir didampingi H.Tamrin, Anwar Kamil, M. Yunus dengan melibatkan Andi Pababari di kantor camat Topoyo yang difasilitasi oleh Aras Tammauni membahas mengenai pembentukan Mamuju Tengah secara mendalam. Dalam kurun waktu lima tahun tidak ada dokumen yang dapat diarsipkan hal ini dikarenakan tidak adanya respon dari pemerintah, tidak berani melawan karena mereka adalah pegawai.

3. Tahap ketiga 2004-2011

Pada tahap ini telah dilakukan sosialisasi secara sembunyi-sembunyi yang diketuai oleh Aarsal Aras yang merupakan anak dari Aras Tammauni sebagai penyandang dana utama pergerakan pembentukan Mamuju Tengah dengan sekretaris umum Mahyuddin. Sosialisasi yang dilakukan ini berada dibawah naungan sebuah komite resmi. Komite ini disebut dengan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KAPKMT). Dalam kurun waktu setahun tidak ada dokumen yang dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada bulan

Oktober H.Aruchul Tahir ke Tobadak untuk menemui Aras Tammauni. Aras Tammauni mengatakan bahwa untuk dibubarkannya komite tersebut.

“komite yang bentuk adalah kita semua pak, seharusnya sudah menjadi tanggung bersama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang telah ada sejak dulu”²⁷

Dengan demikian maka segeralah dibentuk suatu forum percepatan yang dinamakan Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang diketuai oleh H.Aruchul Tahir dengan sekretaris umum Muh. Anwar Kamil. Namun forum ini juga tidak dapat menghasilkan sebuah perubahan yang signifikan. Atas dasar kerjasama demi tercapainya Kabupaten Mamuju Tengah secepatnya maka pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 29 Agustus di Mamuju telah ditetapkan sebuah wadah hasil kerjasama antara Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, Komite Aksi Pembentukan Mamuju Tengah, unsur Partai Politik/Organisasi Masyarakat, pemuda/mahasiswa, tokoh masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang kemudian disahkan menjadi Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KPPKMT) yang diketuai oleh Aruchul Tahir dengan sekretaris umum Mahyuddin. Susunan kabinet kerja ini dapat dilihat pada lampiran!

Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas sebagai berikut: 1). Menyusun program kerja dan program strategis serta jadwal kegiatan sampai terwujudnya Kabupaten Mamuju Tengah; 2). Melakukan pendekatan persuasif dan sekaligus tekanan terhadap pihak-pihak yang menghambat proses terwujudnya Kabupaten Mamuju Tengah; 3). Melakukan deklarasi di wilayah Calon Kabupaten Mamuju Tengah; 4). Melakukan sosialisasi

²⁷ Wawancara dengan H. Aruchul Tahir, pada tanggal 29 Juli 2016 di Mamuju

kepada masyarakat yang berada di wilayah Calon Kabupaten Mamuju Tengah terhadap setiap perkembangan dana atau kemajuan yang telah dicapai Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah; dan 5). Seluruh pengurus Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang tercantum dalam keputusan bersama, melakukan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengantar terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun permasalahan lain yang tidak kalah penting untuk segera diselesaikan antara lain terkait dengan masalah administrasi yang kemudian menjadi tanggung jawab Aras Tammauni yang apabila Mamuju Tengah menjadi sebuah kabupaten maka beliau akan naik menjadi salah satu calon bupati.

Kemudian langkah selanjutnya H.Aruchul Tahir dibantu oleh Masriadi masuk ke Mamuju Tengah dengan melakukan sosialisasi antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Kegiatan ini memakan waktu kurang lebih selama 36 hari. Dokumen-dokumen yang telah disimpan menjadi permasalahan lagi karena pada waktu itu untuk menjilid dokumen yang banyak belum ada di Mamuju. Biaya untuk ke Makassar ditambah ongkos jilid adalah sekitar lima juta rupiah.

4. Tahap keempat (Tahap Pengesahan) Tahun 2012

Masalah tidak sampai hanya pada sosialisasi dan pengarsipan dokumen namun yang paling penting adalah mengenai permasalahan pengesahan. Kemudian pembicaraan lanjut ini dibawa ke DPR dan diundang 35 perwakilan dari Mamuju. Para perwakilan ini meminta untuk segera diresmikannya atau ditindaklanjuti mengenai pembentukan Mamuju Tengah menjadi sebuah

kabupaten baru di Sulawesi Barat. Apabila permintaan ini tidak terealisasi maka akan datang kembali perwakilan-perwakilan dari Mamuju dengan tindakan yang lain. Tidak lama kemudian tepatnya tiga hari sesudah diadakan pertemuan di DPR maka dikeluarkannya aturan bupati untuk membentuk sebuah tim untuk kajian daerah.

Jalan yang ditempuh adalah dengan seringnya mengunjungi pemerintah pusat di Jakarta yaitu ke Menteri Dalam Negeri. Selain itu juga membentuk sebuah tim lobi yang diketuai oleh Jamaluddin, dengan sekretarisnya yaitu Ahmad Taufik untuk dibawa ke Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Mamuju Tengah. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Tobadak, Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 2878,57 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk $\pm 112,085$ jiwa pada tahun 2012 dan 56 (lima puluh enam) desa/kelurahan.

Selain itu Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensial untuk berbagai jenis komoditi pertanian dan perkebunan. Hasil komoditi pertanian yang menjadi unggulan selain padi dan jagung adalah buah jeruk, rambutan, durian, mangga, dan pisang, sedangkan untuk perkebunan, komoditi unggulan adalah kelapa sawit, kakao (coklat) dan kelapa hibrida yang mengalami perkembangan produksi yang

cukup signifikan. Hampir semua tanaman pangan seperti kacang tanah, ubi jalar, dan kedelai juga mengalami kenaikan luas panen dan produksi dari tahun ke tahun.

Disamping itu juga terdapat jenis bahan tambang seperti tembaga, tanah liat dan pasir besi. Besarnya produksi bahan galian seiring dengan meningkatnya perkembangan infrastruktur seperti gedung kantor, jalan, rumah, dan lain-lain yang meningkat dari tahun ke tahun. Hasil bumi ini baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui merupakan potensi yang sangat besar untuk membentuk sebuah kabupaten baru. Potensi lain yang juga dimiliki oleh Mamuju Tengah sehingga layak menjadi sebuah kabupaten baru adalah dilihat dari industri. Industri ini sendiri terbagi menjadi industri rumah tangga, kecil, menengah, dan besar. Industri rumah tangga di Mamuju Tengah pada tahun 2012 tercatat sebanyak 15 usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 296 orang. Sedangkan industri kecil sebanyak 10 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 55 orang. Berdasarkan nilai produksi yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan kecil pada tahun 2012, kedua industri mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Mamuju Tengah telah banyak yang dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri namun tetap masih harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Potensi lain yang tidak kalah penting adalah dari segi faktor pariwisata. Walaupun bukan daerah tujuan wisata, sebenarnya Mamuju Tengah memiliki banyak tempat menarik untuk dijadikan objek wisata. Seperti air terjun Kalando, air terjun Kampaja, pantai Kambunong,

pantai Tumbu dan masih banyak lagi objek wisata yang lain.²⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi yang dimiliki oleh Mamuju Tengah sangat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakatnya setelah pembentukan. Hal ini menjadi daya tolak ukur tersendiri sebagai daerah otonomi baru kedepannya.

Terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Tobadak, tepatnya di desa Benteng Kayu Mangiwang Kota Terpadu Mandiri, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Mamuju Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹

Dengan adanya wacana pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah tentunya mengundang reaksi dikalangan masyarakat Mamuju, Mamuju Tengah

²⁸ Badan Pusat Statistik, *Mamuju Tengah Dalam Angka 2013*. (Mamuju: BPS, 2013)

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

dan pemerintah. Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri maupun pemerintah.

a. Respon Masyarakat

Munculnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah ini lahir dari hati nurani masyarakat Mamuju Tengah. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat Mamuju Tengah dalam mewacanakan kabupaten baru.

“Sebagai masyarakat biasa tentunya saya secara pribadi sangat senang, karena untuk mengurus sesuatu ke Mamuju memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Lagipula Mamuju Tengah ini sumber daya alamnya sangat melimpah, pasti bisa mengurus daerahnya sendiri”³⁰

Masyarakat yang berada di Mamuju Tengah merasa bahwa potensi yang dimiliki oleh wilayah ini sangat besar dan tidak menjadi permasalahan apabila Mamuju Tengah membentuk sendiri daerah otonomnya. Hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan terlalu jauh, ini mengakibatkan pelayanan kesejahteraan sulit terjangkau dan tidak merata khususnya untuk kawasan yang terpencil.

b. Respon Pemerintah

Terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru yang dibentuk dengan UU RI No. 4 Tahun 2013 bukan hanya lahir dari masyarakat Mamuju Tengah saja tetapi unsur pemerintah seb

agai penentu kebijakan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Respon positif dari pemerintah daerah dan pusat merupakan suatu hal yang sangat ditunggu oleh panitia

³⁰Wawancara dengan Muh. Saleh Rusmin. Pada tanggal 30 juni 2016 di Tobadak

pembentukan beserta masyarakat yang sangat antusias dalam mendukung pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah.

“Pihak pemerintah sangat mengapresiasi adanya wacana pembentukan ini, namun harus diketahui bahwa banyak aspek yang harus dilewati demi tercapainya cita-cita pembentukan ini. Salah satunya yaitu harus ada Undang-Undang yang menaungi pembentukan Mamuju Tengah”³¹

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah pemekaran berdasarkan pengkajian suatu analisis berbagai aspek dalam pembentukan daerah otonom yang bersifat otonom. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah yang tertuang baik pada UU No.22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP No.12 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Dasar kriteria-kriteria yang akan digunakan sebagai dasar bagi penetapan kelayakan pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi syarat-syarat pembentukan. Adapun syarat tersebut yaitu syarat kemampuan ekonomi, syarat potensi daerah, syarat sosial budaya, syarat sosial politik dan syarat lain-lain³² yang sekaligus akan dianalisis dalam rangka Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan demikian jelas bahwa usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian syarat saja, seperti halnya sebagian besar dari usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis dan atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah

³¹ Wawancara bersama Bapak Marthen. Pada tanggal 25 Juli 2016 di Topoyo

³² Murtir Jeddawi. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisi Empiris)*. (Yogyakarta: Total Media. 2009). Hlm. 32

harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.³³

1. Kriteria kemampuan ekonomi

Pertimbangan dan tujuan utama pembentukan daerah otonom yang baru adalah untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan kata lain dimekarkannya Kabupaten Mamuju menjadi Kabupaten Mamuju Tengah adalah tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Secara teoritis untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi diperlukan berbagai upaya yang menyangkut baik aspek ekonomi mikro dan makro.

2. Kriteria potensi daerah

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun potensi yang berupa kelembagaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu persoalan penting lain dalam upaya pengembangan potensi daerah adalah sumber daya berupa modal.

³³ Lukman santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 131

3. Kriteria sosial budaya

Letak geografis Mamuju Tengah yang sangat kaya akan hasil alam seperti pertanian menjadikan Mamuju Tengah daerah pertanian yang berkembang dengan baik. Sebagai daerah yang lebih dominan adalah pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif dan upaya mendorong peningkatan pendapatan perkapita. Selain itu kriteria ini juga dapat diukur dari sarana peribadatan.

4. Kriteria sosial politik

Kajian pada kriteria sosial politik dalam hal ini dipusatkan pada dua indikator, yakni partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan sub indikator rasio penduduk yang ikut pemilu terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, serta indikator organisasi kemasyarakatan.

5. Kriteria jumlah penduduk

Penduduk merupakan faktor utama yang menentukan ukuran pemerintah daerah. Keadaan geografis dalam suatu daerah akan menentukan karakteristik masyarakat, mata pencaharian maupun budayanya. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan perluasan pemukiman, yang kemudian muncul berbagai masalah sosial sebagai akibat kurangnya daya dukung lingkungan. Demikian pula terlalu banyaknya penduduk dapat berakibat pada ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara optimal.

Pada tanggal 14 Desember 2012 penantian panjang masyarakat Mamuju Tengah akhirnya tercapai. Peresmian Kabupaten Mamuju Tengah disambut gembira oleh segenap lapisan masyarakat. Selanjutnya Bapak Junda Maulana diangkat sebagai *carateker* Mamuju Tengah. Hal penting lainnya yang selanjutnya

dilakukan adalah Mamuju Tengah harus mempunyai lambang tersendiri sebagai langkah awal untuk memberikan gambaran suatu wilayah daerah, kondisi, dan masyarakatnya, untuk kelengkapan administrasi pemerintah daerah dan pelengkap identitas suatu daerah. Kabupaten Mamuju Tengah perlu memiliki identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofi yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. Maka diadakanlah sayembara seleksi logo, mars dan hymne Kabupaten Mamuju Tengah yang diikuti peserta yang tidak hanya dari Sulawesi Barat, tapi juga dari Jakarta, Bandung, Magelang, Solo dan peserta lainnya yang ada diluar Mamuju Tengah. Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada lampiran!

BAB IV

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

A. Kebijakan Setelah Pembentukan Mamuju Tengah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah yang bersifat mutlak dan urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* yang dilaksanakan secara bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah. Setiap urusan yang bersifat *concurrent* terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada pula bagian yang diserahkan kepada kabupaten/kota (desentralisasi).³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada asas sentralisasi dan desentralisasi, hendaknya tidak ditempatkan pada kutub yang

³⁴Laporan Kerja Pertanggungang Jawaban Kabupaten Mamuju Tengah. (Mamuju Tengah: Bappeda, 2015)

berlainan (dichotomy), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan (continuum). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Penjabaran lebih lanjut terhadap urusan kewenangan dimaksud telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi

dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru yang dibentuk dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013.³⁵ Dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah dengan ibukota berada di Kecamatan Tobadak tepatnya di Kota Terpadu Mandiri maka secara otomatis daerah ini mendapatkan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana yang diatur didalam Undang - Undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.³⁶

Berdasarkan isi dari undang undang tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah harus segera melakukan pembenahan. Pembenahan yang harus dilakukan yaitu pada beberapa bidang yang menjadi wewenang pemerintah yang sifatnya mendesak untuk segera dibenahi karena menyangkut dengan kepentingan secara umum.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah secara terencana dan terpadu dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25

³⁵ UU Republik Indonesia No.4 Tahun 2013

³⁶ UU No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 Ayat 2

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu melalui tahapan perencanaan jangka panjang (RJPD Provinsi Sulawesi Barat), jangka menengah (RPJMD kabupaten induk) dan tahunan yang disusun secara partisipatif (melibatkan masyarakat, dunia usaha, dewan, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menghasilkan perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Implementasi program/kegiatan RKPD sebagian besar didanai melalui APBD Kabupaten yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hal dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyikapinya dengan melaksanakan urusan wajib yang meliputi a). Pendidikan, b). Kesehatan, c). Pekerjaan umum, d). Lingkungan hidup, e). Penataan ruang, f). Perencanaan pembangunan, g). Perumahan, h). Kepemudaan dan Olahraga, i). Penanaman modal, j). Koperasi dan UKM, k). Kependudukan dan Catatan Sipil, l). Ketenagakerjaan, m). Ketahanan pangan, n). Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, o). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, p). Perhubungan, q). Komunikasi dan Informatika, r). Pertahanan, s). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, t). otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, u). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, v). Sosial, w). Kebudayaan, x). Statistik, y). Kearsipan dan z). Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan meliputi: a). Pariwisata, b). Pertanian, c). Perikanan, d). Kehutanan e). Energi dan Sumber Daya Mineral, f). Industri, g). Perdagangan dan h). Ketransmigrasian. Sebagai daerah otonom baru, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam awal pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat berupaya untuk melaksanakan berbagi urusan wajib dan pilihan tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun fokus utama yang sedang dan akan dilakukan adalah mempersiapkan pondasi/dasar yang kuat bagi pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, antara lain:

- 1). Penyusunan dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah daerah
- 2). Mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Pertama
- 3). Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- 4). Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
- 5). Peningkatan kemampuan perencanaan daerah
- 6). Fasilitas pembentukan lembaga legislatif daerah (DPRD) dan
- 7). Pengembangan ekonomi daerah ³⁷

³⁷Bappeda. Op.Cit

Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh Mamuju Tengah pasca terbentuk menjadi sebuah kabupaten adalah antara lain kebijakan bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

1. Bidang ekonomi

Pembangunan bidang perekonomian diarahkan pada sektor pertanian dan perdagangan umum serta UKM sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, pemberdayaan kelompok usaha kecil dan menengah dipedesaan melalui bantuan modal kerja dan teknologi, mempermudah sistem perizinan untuk usaha kecil dan menengah menciptakan kondisi yang aman dan sehat bagi investor dalam negeri maupun asing, melakukan promosi potensi daerah serta menyediakan sarana dan prasarana untuk mendorong investasi, mengembangkan pasar-pasar tradisional untuk mendorong sektor riil.

2. Bidang Sosial

Masih banyak yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Mamuju Tengah perihal pengembangan pembangunan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mamuju Tengah. Diberbagai sektor dalam ruang lingkup pemerintahan dengan fokus pada bidang masing-masing. Ada beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan pada bidang sosial diantaranya adalah pemberian insentif petugas pelayanan sosial kecamatan, pertemuan koordinasi kementerian sosial dan program keluarga harapan tingkat kabupaten, pelestarian/ peringatan nilai-nilai sosial/kepahlawanan, pemberian insentif petugas siaga kecamatan, pembinaan dan

pendampingan lembaga kesejahteraan sosial dan orientasi pengurus karang taruna.³⁸

3. Bidang Pendidikan

Untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyebaran secara merata penempatan guru dengan perbandingan jumlah siswa sekolahn di setiap jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA Sederajat, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terkesan kekurangan guru/tenaga pedidik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya SPP untuk pendidikan SD, SMP, dan SMA Sederajat akan lebih ditingkatkan biaya pendidikan melalui APBD Kabupaten dengan menetapkan standar perhitungan biaya yang disesuaikan dengan jumlah siswa setiap sekolah sehingga kebutuhan biaya setiap sekolah dapat terpenuhi dan untuk lebih merangsang minat belajar terhadap siswa.³⁹

4. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan akan diarahkan untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada masyarakat, disamping peningkatan kualitas tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, dan bidan juga lebih penting adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk dapat mengurangi rujukan kerumah sakit lain karena minimnya peralatan kesehatan yang ada pada Puskesmas, Pustu,

³⁸ Bina Program Kabupaten Mamuju Tengah. (Mamuju Tengah: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013)

³⁹ Laporan Kerja Pertanggung Jawaban Kabupaten Mamuju Tengah. (Mamuju Tengah: Bappeda, 2014)

bahkan sampai pada Poskesdes. Mendorong peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan pelayanan secara gratis, menetapkan standar pelayanan minimal dan pedoman penyuluhan serta kampanye kesehatan.⁴⁰

B. Dampak Pembentukan Mamuju Tengah

Hasil dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah setelah empat tahun terbentuk dapat kita lihat dalam beberapa bidang yang diprioritaskan. Sejak pelantikan Pejabat Bupati dari Bapak Junda Maulana sampai pada *carateker* kedua Bapak Ismail Zainuddin ditemukan fakta bahwa kondisi infrastruktur wilayah menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Disamping kondisi sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan serta kondisi perekonomian.

Ternyata setelah kurang lebih tiga tahun pembentukan tidak semua lapisan masyarakat merasakan hal yang lebih baik setelah pemekaran. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan infrastruktur yang dirasakan hampir merata pada semua wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Kondisi terparah tentu saja dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antara wilayah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa dalam kondisi rusak parah. Bahkan pada musim hujan, jalanan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Bahkan pada beberapa wilayah tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Akibatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas, bahkan terputus. Jalan merupakan prasarana

⁴⁰ Bappeda. Op.Cit

angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang meningkat menuntut adanya sarana transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari suatu daerah ke daerah lain.⁴¹

Tentu saja kondisi ini menyebabkan hasil-hasil pertanian tidak dapat dipasarkan, yang berujung pada kerugian. Namun pada saat sekarang ini pemerintah telah mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana hal ini dapat dilihat dengan perbaikan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan dengan Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju. Banyak jalan yang sudah diperlebar dan di beton. Salah satu jalan yang dibeton adalah jalan menuju dermaga Babana.

Tabel 4.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013 – 2014 (Km)

No	Permukaan Jalan	2013	2014
1	Diaspal	104,1	104,1
2	Kerikil	305,58	305,58
3	Tanah	116,629	116,629
4	Lainnya	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik. *Mamuju Tengah Dalam Angka 2015*. BPS Kabupaten Mamuju. 2015

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 sampai pada tahun 2014 tidak ada sama sekali pertambahan yang terjadi dalam hal perbaikan jalan. Panjang jenis permukaan jalan tidak mengalami perubahan.

⁴¹ Badan Pusat Statistik. *Mamuju Tengah Dalam Angka 2013*. (Mamuju: BPS, 2013)

Pelayanan kesehatan juga sama, walaupun terdapat Poskesdes dan Posyandu dengan bangunan seadanya, namun tidak memiliki tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang terbatas, dengan sarana pelayanan yang tidak memadai, menjadi masalah dalam pemberian pelayanan kesehatan di desa. Sementara desa dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan Desa Siaga Aktif. Diharapkan masyarakat desa memiliki kepedulian, tanggap, mampu mengenali, dan mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri. Sehingga terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa.

Tabel 4.2 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2012 - 2014

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Rumah Sakit	-	1	3
2	Rumah Sakit Bersalin	-	-	-
3	Puskesmas	10	17	21
4	Poskesdes	65	96	108
5	Praktek Dokter	7	18	23
6	Gedung Farmasi	-	1	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2013, 2014, dan 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pertambahan yang paling besar adalah pada fasilitas praktek dokter sebanyak 23 dan poskesdes sebanyak 108. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2013 pertambahan jumlah Poskesdes sebanyak 31., dan mengalami penurunan pada tahun 20014 kerna

pertambahannya hanya 21 Poskesdes. Sedangkan Rumah Sakit Bersalin selama kurun waktu 3 tahun sama sekali tidak dapat dibangun.

Pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan adalah dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi. Demikian juga dengan Kabupaten Mamuju Tengah yang berupaya menciptakan suatu masyarakat yang berpendidikan. Keadaan pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dari jumlah sekolah dan murid, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).⁴²

Tabel 4.3 Banyak Sekolah, Murid, dan Guru di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2012-2014

No	Tahun	Sekolah	Guru	Murid
1	2012	234	907	31.303
2	2013	256	1.002	31.800
3	2014	297	1.267	32.015

Sumber: Badan Pusat Statistik Mamuju Tahun 2013, 2014 dan 2015

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah sekolah, guru dan murid di Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini juga harus tetap diimbangi dengan kualitas dari para pengajar. Kerna bila dilihat langsung dilanpangan banyak tenaga pendidik khususnya pengajar di Taman Kanak-Kanak tidak mempunyai latar belakang

⁴² Badan Pusat Statistik. *Mamuju Tengah Dalam Angka 2015*. (Mamuju: BPS, 2015)

pendidikan keguruan. Banyak gur-guru TK yang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas saja. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada kualitas pengajaran yang diberikan.

Kondisi sarana dan prasarana perekonomian mengalami hal yang sama. Pasar desa pada beberapa wilayah, hanya berupa hamparan tanah kosong dengan beberapa bangunan los tempat berjualan. Pasar desa yang menjadi sarana jual beli kebutuhan masyarakat dan juga sebagai tempat pemasaran hasil pertanian, menjadi ajang transaksi apa adanya.

Harga kebutuhan yang dijual dari luar desa melambung tinggi, sementara hasil pertanian masyarakat dibeli dengan harga murah. Masyarakat berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kondisi ini. Masyarakat desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian, juga masih mengalami keterbatasan. Masyarakat terkendala dengan penyediaan bibit, benih, pupuk, pakan, alat-alat pertanian, bantuan modal hingga pemasaran. Akibatnya, karena kondisi tersebut, lahan pertanian yang masih sangat luas di desa tidak termanfaatkan secara optimal.

Jadi bila dilihat kembali dampak dari pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah ini hanya dirasakan pada pusat pelayanan pemerintahan saja yang rentang kendalanya lebih dekat. Tetapi secara ekonomi maupun lainnya tidak jauh berbeda pada saat Mamuju Tengah masih dalam kawasan Kabupaten Mamuju. Pada sisi lain masyarakat tidak berdaya mengelolah atau menolak program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, walaupun bukan menjadi kebutuhan mereka.

Serangkaian gambaran diatas, baik ditinjau dari aspek potensi dan kendala yang ada dalam menata pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, disadari bahwa kemauan dari semua pihak untuk melakukan perubahan belumlah cukup. Namun pada tahap awal hal ini penting untuk dapat dikelola agar dapat memahami arah pembangunan yang selanjutnya menjadi visi bersama dari semua elemen pembangunan, untuk bergerak secara bersama. Seiring dengan proses tersebut, beberapa tantangan dalam mengangkat kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi perubahan sebagai konsekwensi langsung dari proses pembangunan dan kemajuan yang diharapkan tersebut, maka system pelayanan, pola fasilitasi yang berbasis pada kemampuan dan karakteristik lokal penting untuk menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan kedepan.

Kolaborasi peran menjadi sebuah harga mutlak atas arah dari perubahan yang diharapkan bersama, pola pembangunan yang berjalan secara parsial selama ini selain telah melahirkan pengaburan arah dari pembangunan, juga membuat apatisme masyarakat terhadap pembangunan yang selanjutnya membuat lemahnya peran serta segenap elemen pembangunan dalam menciptakan perubahan yang mengarah pada kesejahteraan bersama. Lemahnya empati dan rasa memiliki masyarakat atas proses dan hasil pembangunan selama ini, menuntut pemerintah daerah untuk memikirkan sebuah pola alternative, untuk melahirkan sebuah kerangka dalam membangun penataan untuk dapat memberi ruang dan peran pada semua pihak secara setara dan proporsional.

Gambaran kondisi yang dihadapi dengan fenomena dan tuntutan masyarakat guna pengembangan wilayah, menuntut pemerintah daerah

memikirkan sebuah mekanisme atau pola yang dianggap efektif bagi daerah untuk memulai proses yang dapat memberi jaminan efektifitas serta optimalisasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah ini. Pola yang dipilih harus dapat menjamin bahwa setiap elemen yang ada diharapkan dapat memainkan peran secara tepat guna, khususnya pada 3 elemen dasar yang dianggap penting yakni, pengambil kebijakan, perencana daerah, serta masyarakat melalui peran fasilitator. Ketiga elemen tersebut sesuatu yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan daerah. Untuk itu, menjadi penting bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk membangun kolaborasi peran yang sinergis diantara ketiganya secara terorganisir.

Aspek lain yang juga tidak kalah penting dalam menggerakkan roda pembangunan di daerah, adalah penguatan komunitas dalam perencanaan pembangunan pada level desa. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa desa merupakan arah dan sekaligus basis pelaksanaan pembangunan di kabupaten Mamuju Tengah. Gambaran kondisi diatas yang menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengupayakan strategi pembangunan di desa, melalui Program Bangun Desaku. Program ini sinergi dengan program pembangunan lainnya.⁴³

. Walaupun tidak menutup kemungkinan kendala-kendala dalam pembangunan tetap akan ada. Kendala yang paling utama adalah setelah

⁴³. <http://matengbd.blogspot.co.id/2014/06/pergub-mateng-mengenai-program-bangun.html>. di akses pada Tanggal 10/12/2015

pembentukan, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sangat lambat dalam hal pemilihan kepala daerah, hal ini terbukti bahwa Pilkada pertama pemilihan bupati yaitu pada tanggal 9 Desember 2015.

Namun perlu diketahui juga bahwa setelah tiga tahun terbentuk masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah juga merasakan hal yang positif, hal ini dikarenakan bahwa rentang kendali pemerintahan pusat sudah dekat yaitu berada di ibukota Kabupaten di Kota Terpadu Mandiri yang berada di Kecamatan Tobadak. Sebagai tempat ibukota Kota Terpadu Mandiri memang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah Kabupaten Mamuju Tengah. Karena pusat pemerintahan yang sudah dekat maka sangat diharapkan agar pembangunan akan lebih bisa disamaratakan dan berkembang lebih cepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pembahasan diatas, maka hasil dari penulisan ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya landasan pokok yang melatar belakangi munculnya gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu karena rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat Mamuju di wilayah utara teramat jauh, sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lambannya pemerataan pembangunan, dan lambannya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia.
2. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam siding paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013.
3. Setelah Kabupaten Mamuju Tengah terbentuk, maka pemerintah mengambil langkah langkah dalam perbaikan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Namun dampak dari pemekaran ini belum sepenuhnya dirasakan perubahannya, hal ini dikarenakan hanya dibidang pemerintahan saja yang mengalami perubahan signifikan.

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain: 1). Implikasi terhadap masyarakat untuk kesejahteraan sumber daya manusia (SDM), 2). Implikasi terhadap peran pemerintah dalam usaha pembangunan dan pengembangan.

C. Saran


1. Hasil penulisan ini masih mengalami beberapa kendala salah satunya adalah kurang lengkapnya data yang mengenai langkah langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, oleh karena itu penulis mengharapkan agar kiranya apabila ada penulisan yang sama maka sebaiknya untuk lebih mendalami tentang permasalahan tersebut.
2. Kepada segenap lapisan masyarakat dan pemerintah diharapkan agar kiranya memperbanyak dan menyebarluaskan penulisan ini untuk dipelajari dan diketahui oleh masyarakat dan generasi muda agar mereka memiliki pemahaman tentang masa lalu dari pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & Surjomihardjo, Abdurrahman. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta: YIIS dan LEKNAS-LIPI
- Abdullah, Taufik. 1978. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Amran, Muh. 2015. *Ujung Pandang: Kajian Sejarah Perluasan Ruang Kota Makassar*. Skripsi. FIS UNM
- Azmi. 2013. *Sejarah 34 Provinsi Indonesia*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju*. Mamuju: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Mamuju Dalam Angka 2007*. Mamuju. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. 2007
- Bappeda Kabupaten Mamuju. 2013. *Mamuju Tengah Dalam Angka 2013*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju
- Bappeda Kabupaten Mamuju. 2014. *Mamuju Tengah Dalam Angka 2014*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju
- Bappeda Kabupaten Mamuju. 2015. *Mamuju Tengah Dalam Angka 2015*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju
- Basrul. 2004. *Perkembangan Kabupaten Majene 1960-2000*. Skripsi. FEIS UNM
- Fatwa. 2002. *Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Gottschlak, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Harida. 2005. *Kota Watampone 1991-2003*. Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah UNM
- <http://mastarmudi.blogspot.com>. pengertian observasi (diakses 25 januari 2016)
- [http://matengbd.blogspot.co.id/2014/06/pergub - mateng - mengenai - program bangun.html](http://matengbd.blogspot.co.id/2014/06/pergub-mateng-mengenai-program-bangun.html). di akses pada tanggal 10/12/2015

- Jeddawi, Murtir. 2002. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Madjid, Muh. Saleh & Hamid, Abd. Rahman. 2008. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Rayhan Intermedia
- Maras, Bustan Basir. 2007. *Tapak-tapak Perjuangan Berdirinya Mamuju Utara*. Yogyakarta: Annora Media
- Nawawi, Muh. 2005. *Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Skripsi. Makassar: FIS UNM
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas)*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Priyadi, Priyadi. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Purnawati. 2009. *Pembentukan Kabupaten Toraja Utara 2001-2009*. Skripsi. Makassar: FIS UNM
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sapriallah & Idham. 2010. *Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Surakarta: Zada Haniva
- Suhaemi. 2013. *Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat*. Skripsi. Makassar: FIS UNM,
- Tim Pengajar Pendidikan Sejarah. 2012. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: UNM
- Lampiran Kepres No. 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
- Laporan Kerja Pertanggung Jawaban Pejabat Bupati 2015.
- UU No. 22 Tahun 1998 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Otonomi Daerah
- UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

Lampiran 1: Usulan Judul Skripsi

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar Tel. 885105

USULAN JUDUL SKRIPSI

A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Sartika Ayu Mentari
Nim : 1262041004
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Alamat : Jl. Makkiobaji Raya

B. JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (2007-2015)
2. Koperasi LKM Benteng Kayu Mangiwang 2004 – 2015
3. Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Sawit di Kecamatan Tobadak 2004-2014

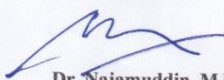
C. JUDUL YANG DITERIMA

*Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah
2007-2015*

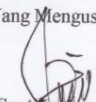
Makassar, 12 January 2016

Disetujui Oleh :

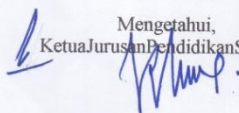
Penasehat Akademik


Dr. Najamuddin, M.Hum
NIP. 196404723 199203 1 003

Yang Mengusulkan


Sartika Ayu Mentari
NIM. 1262041004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah


Dr. Patahuddin, M.Pd
NIP. 19641231 199003 1 033

Lampiran 2: Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	
	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	
	FAKULTAS ILMU SOSIAL	
	Jalan : A.P. Pettarani Makassar Laman : FIS_UNM@unm.ac.id	
Nomor : 2864/UN36.6/DL/2016		10 Juni 2016
Lamp. : -		
Hal : Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing		
Yth. : Sdr. Sartika Ayu Mentari di Makassar		Stambuk : 1262041004
<p>Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 10 Juni 2016 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:</p> <p>Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah 2007-2015.</p> <p>Dosen Pembimbing :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Najamuddin, M.Hum.2. Dr. Patahuddin, M.Pd. <p>Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.</p> <p>Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.</p>		
		<div> Dr. Firman Umar, M.Hum. NIP.196108121988031002</div>
Tembusan:		
<ol style="list-style-type: none">1. Dekan (sebagai laporan)2. Ketua Jurusan Pend. Sejarah		

Lampiran 3: Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
	FAKULTAS ILMU SOSIAL
	Jalan : A.P. Pettarani Makassar Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor	: 2865/UN36.6/PI/2016	10 Juni 2016
Lamp.	:	
Hal	: Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian	
Yth.	: GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT	

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Kabupaten Mamuju Tengah** dalam rangka penulisan skripsi.

N a m a	: Sartika Ayu Mentari
S t a m b u k	: 1262041004
Jurusan/Program Studi	: Pend. Sejarah

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Najamuddin, M.Hum.
2. Dr. Patahuddin, M.Pd.

Masalah yang diteliti :

Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah 2007-2015

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Erman Umar, M.Hum.
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan Pend. Sejarah

Lampiran 4: Izin Penelitian dari Kesbangpol Prov. Sulbar

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
H. Abdul Malik PattanaEndeng (Komp. Gubernur Sulawesi Barat) Telp/Fax (0426)2325170 Mamuju 91512

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/ 170/BKBP

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 8 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 4 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembagian Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor : 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37).

2. Menimbang : 1. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor :440.02/4280/Polpum, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Lembaga Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 2865/UN36.6/PI/2016 Tanggal 10 Juni 2016. Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

a. Nama/Objek : **Sartika Ayu Mentari**
b. Jabatan/Tempat : Penelitian /Stambuk. 1262041004, Kel/Desa. Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju.
c. Untuk : 1) Melekukan Penelitiandengan proposal berjudul“ **Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah 2007-2015 “.**
2) LokasiPenelitian : Kabupaten Mamuju Tengah
3) Waktu/Lama Penelitian : 27 Juni 2016 s.d Selesai;
4) Anggota Tim Peneliti : -
5) BidangPeneliti : Pendidikan Sejarah
6) Status Penelitian : Baru.
d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Cq BadanKesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, paling lambat 6 (Enam)Bulan setelah selesai penelitian.

Demikian rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.


Mamuju, 27 Juni 2016
an, KEPALA BADAN
SEKRETARIS BADAN

MUHAMMAD SALIL, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19640106 199203 1 007

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TembusandisampaikankepadaYth:
1. DirjenPolitikdan Pemerintahan Umum Depdagri di Jakarta;
2. BapakGubernur Sulawesi Barat (SebagaiLaporan) di Mamuju;
3. BupatiMateng Cq. Badan KesbangPol dan Linmas Kab. Mateng di Mateng;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar;
5. Saudara (i) **Sartika Ayu Mentari**.

Lampiran 5: Izin Penelitian dari Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah

 **PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Poros Tobadak Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat, Kode Pos 91563

REKOMENDASI
NO : 070/034/VII/2016
TENTANG :

Penelitian Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2007-2016.

Berdasarkan Surat dari Universitas Negeri Makassar Nomor : 2865/UN36.6/PI/2016 Tanggal 10 Juni 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian.

Maka kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah Merekomendasikan kepada :

Nama	: SARTIKA AYU MENTARI
NIM	: 1262041004
Fakultas	: Ilmu Sosial
Jurusan	: Pendidikan Sejarah
Alamat	: Desa Mahahe


Untuk : Melakukan Penelitian Dengan Judul ***"PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH 2007-2015"***

Pada Prinsipnya Pemerintah Daerah Menyetujui Mahasiswa tersebut diatas dapat Melakukan Penelitian di Kab.Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat. Mulai tanggal 27 Juni s/d selesai 2016, dengan Ketentuan hasil penelitian disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tobadak
Pada Tanggal 12 Juli 2016

KEPALA KANTOR


Drs. H. SAHARUDDIN TINGGI
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198512 1 072

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (sebagai laporan) di Tobadak;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar di Makassar;
3. Saudara(I) SARTIKA AYU MENTARI
4. Arsip.

Lampiran 6: Surat Selesai Meneliti dari Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Poros Tobadak Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat, Kode Pos 91563

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 076/037/VII/2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. SAHARUDDIN TINGGI**
NIP : 19631231 198512 1 072
Pangkat : Pembina Tk.I
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten. Mamuju Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SARTIKA AYU MENTARI**
Tempat,Tanggal Lahir : Mamuju, 26 Juli 1994
NIM : 1262041004
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Program studi : Pendidikan Sejarah

Yang tersebut namanya di atas,benar telah melakukan penelitian di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi.Sulawesi Barat untuk Menyusun karya tulis ilmiah(skripsi)yang berjudul:

“PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH 2007-2015 ”
Sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d Selesai

Sesudah melaksanakan penelitian dan pertanggung jawaban secara akademik dihadapan tim Penguji diharapkan menyerahkan 1(satu) exemplar fotocopy hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tobadak
Pada Tanggal 28 Juli 2016

KEPALA KANTOR

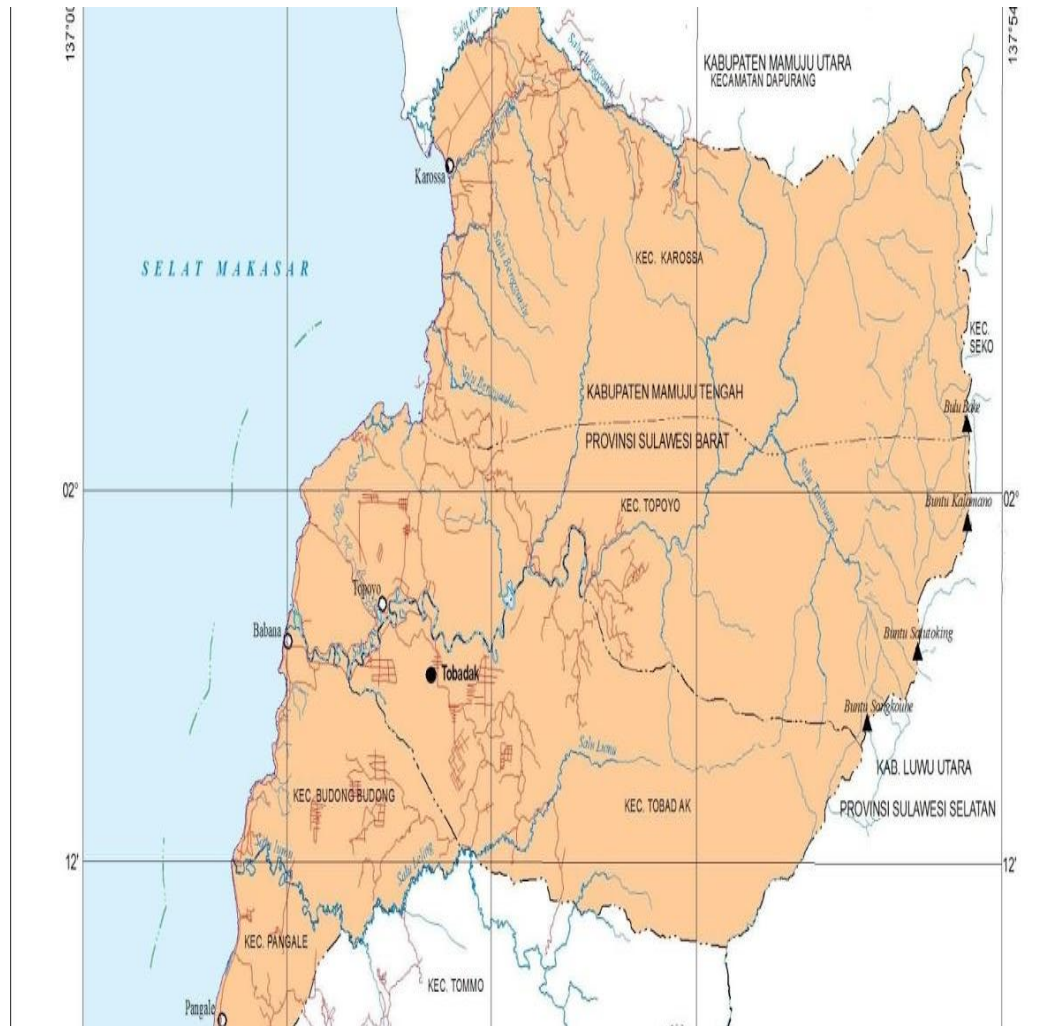

Drs. H. SAHARUDDIN TINGGI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19631231 198512 1 072

Lampiran 7: Peta Provinsi Sulawesi Barat



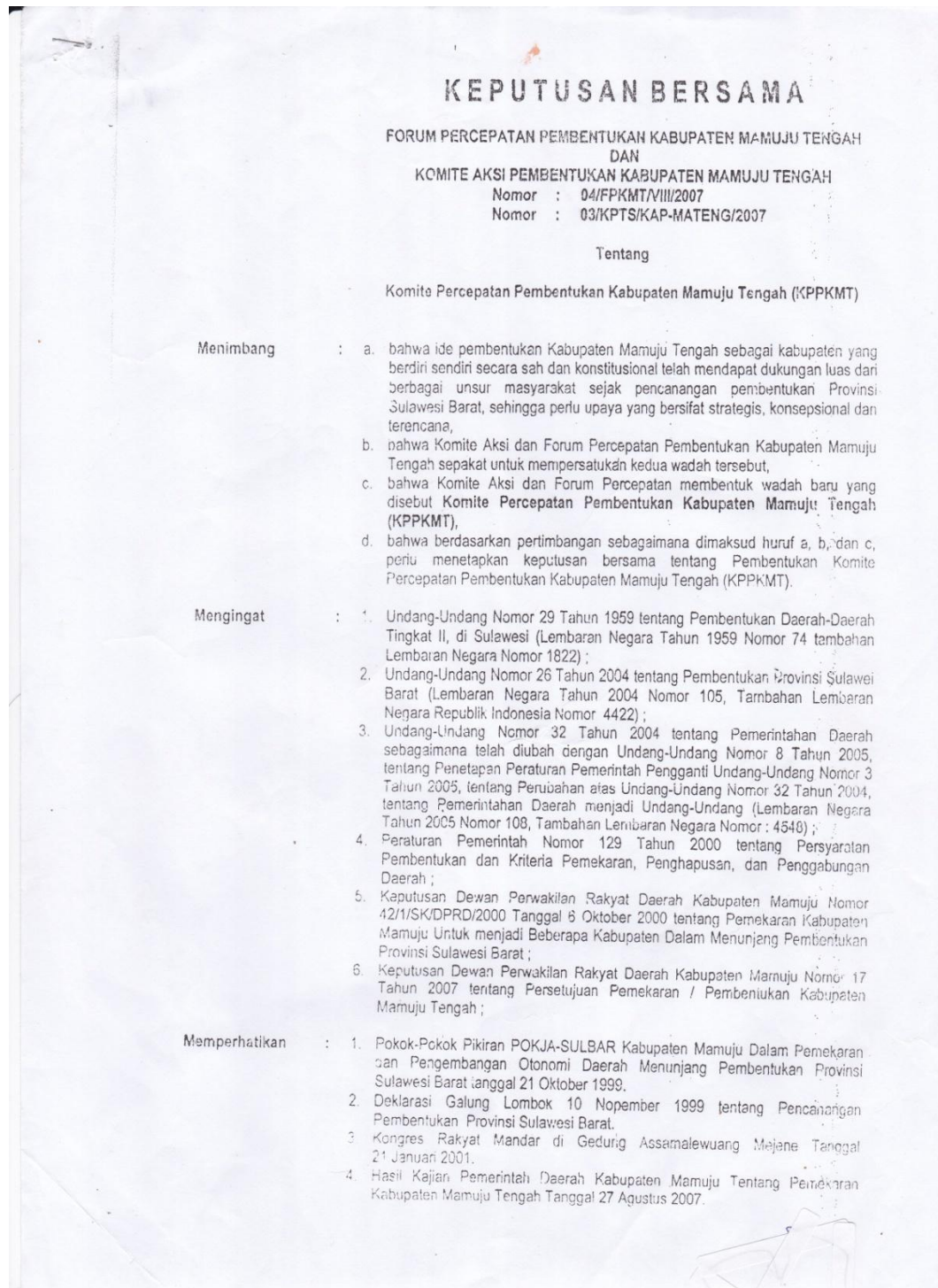
Sumber: <https://budiman.wordpress.com/2012/07/12/peta-sulawesi-barat>

Lampiran 8: Peta Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: <https://ilhamagung.wordpress.com/2013/12/24/peta-mamuju-tengah>

Lampiran 9:Keputusan Bersama FPPKMT dan KAPKMT



5. Keputusan Formatur Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 001/FORMATUR/II/2001 tentang Komposisi dan Personalia Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Meliputi Kecamatan Pangale, Tommo, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa).
6. Keputusan Formatur Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (M.TENG) Nomor 02/Formatur/12/2004 tentang Resolusi Komposisi dan Personalia Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Meliputi Kecamatan Pangale, Tommo, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa).
7. Keputusan Formatur Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 001/Formatur/IX/2005 tentang Komposisi dan Personalia Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah.
8. Saran dan Pendapat yang berkembang pada pertemuan yang dihadiri oleh Pengurus Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Pengurus Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 27 Agustus 2007 di Mamuju.
9. Keputusan Nomor : 01/KPTSB/Kap Mateng-FPPKMT/III/2007 Tentang Komposisi Dan Personalia Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KPPKMT).
10. Surat Bupati Mamuju Nomor 136/1373/III/2007 Tanggal 30 Agustus 2007 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah ;

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG KOMITE PERCEPATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH (KPPKMT) |
| KESATU | : Pengurus Komite dan pengurus Forum Percepatan Kabupaten Mamuju Tengah membentuk wadah baru yang disebut Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KPPMT), diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dengan komposisi dari Personalia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama ini |
| KEDUA | : Susunan komposisi dan personalia KPPMT sebagaimana dimaksud diikut KESATU direkrut dari unsur Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KAP-MATENG), Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, unsur Parpol/Ormas, Pemuda/Mahasiswa, Tokoh masyarakat dan Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, |
| KETIGA | : Memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KPPKMT) untuk melanjutkan amanah perjuangan demi terwujudnya Kabupaten Mamuju Tengah, |
| KEEMPAT | : Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju (KPPKMT) mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Program Kerja dan Program strategis serta jadwal kegiatan sampai terwujudnya Kabupaten Mamuju Tengah, b. Melakukan pendekatan persuasif dan sekaligus tekanan terhadap pihak-pihak yang menghambat proses terwujudnya Kabupaten Mamuju Tengah, c. Melakukan Deklarasi di wilayah Calon Kabupaten Mamuju Tengah, d. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat yang berada di Wilayah Calon Kabupaten Mamuju Tengah terhadap setiap perkembangan dan atau kemajuan yang telah dicapai Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KPPKMT), e. Seluruh pengurus Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KPPKMT) yang tercantum dalam keputusan bersama, melakukan tugas-tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mengantarkan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. |

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, persumber dari seluruh masyarakat yang berada di wilayah persiapan Kabupaten Mamuju Tengah serta sumbangan yang tidak mengikat yang dikoordinir oleh Divisi Usaha Dana Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah.

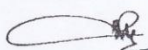
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

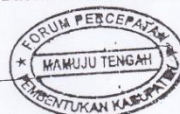
Ditetapkan di : Mamuju
Tanggal : 29 Agustus 2007

FORMATUR

FORUM PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA UMUM


ARUCHUL THAHIR



SEKRETARIS UMUM


H. MUH. ANWAR KAMIL, S. Pd.


KOMITE AKSI
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
(KAP-MATENG)

KETUA UMUM


H. ARSAL ARAS TAMMAUNI

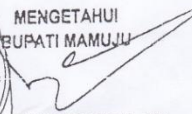


SEKRETARIS UMUM


MAHYUDDIN, S.Ag., M.Pd.

MENGETAHUI
BUPATI MAMUJU




Drs. H. SUHARDI DUKA, MM.

Disampaikan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
4. Bupati Mamuju di Mamuju
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
6. Para Camat se Wilayah Persiapan Kabupaten Mamuju Tengah di tempat
7. Para Kepala Dinas Cabang se Wilayah Persiapan Kabupaten Mamuju Tengah di tempat
8. Para Kepala Puskesmas se Wilayah Persiapan Kabupaten Mamuju Tengah di tempat
9. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat
10. Pimpinan Redaksi RADAR Sulbar
11. Para Kepala Desa se Wilayahh Persiapan Kabupaten Mamuju Tengah di tempat
12. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui

KELOMPOK KERJA	:		
KETUA UMUM		ARUCHUL THAHIR	
KETUA I		H. ARSAL ARAS TAMMAUNI	
KETUA II		Hj. ANDI SALMA SYAMSUDDIN, BBA.	
KETUA III		HASANUDDIN SAILON	
KETUA IV		BAHRI ARSYAD, SH.	
SEKRETARIS UMUM	:	MAHYUDDIN, S.Ag., M.Pd.	
SEKRETARIS I		H. MASRIADI NADI ATJO, SE., M.Si.	
SEKRETARIS II		Hj. WARLIA ARSYAD, S.Pd.	
SEKRETARIS III		H. ASHARI RASYID, S.IP., M.Si.	
SEKRETARIS IV		BUSDIR, S.Pd., MM.	
BENDAHARA UMUM	:	Hj. ANNA MURTINA TASLIM	
BENDAHARA I		H. MUH.TAUFIQ AGUSSALIM, SH.	
BENDAHARA II		Hj. NIRMALA SARI ARAS TAMMAUNI	
BENDAHARA III		H. SYAHRUL SUKARDI, S. Sos.	
SEKRETARIAT	:	1. ABD. RAHMAN. M, S.Sos.	(Koordinator)
		2. MUNAJIB ANWAR, S.Sos.	
		3. QAIMUDDIN, S.Sos., M.Si.	
		4. YUSUF ANWAR, SE.	
		5. AHMAD LUTFI, S.IP.	
		6. JOKO SUPRIYANTO, ST.	
		7. ABDIANSYAH HIJRAH YANAS, S.Sos.	
		8. IRFAN ABDULLAH TALIB, S.Sos.	
		9. SYADRI TAMRIN ENDENG, S.IP.	
		10. MUH. ARSYAD	
PEMBANTU UMUM	:	1. Drs. RAHMAT SANUSI	(Koordinator)
		2. Drs. MADDARESKI SALATING, M.Si.	
		3. Drs. AMRAN S. NUHUNG	
		4. ILHAM ANDI WAWO, S.Pd., MM.	
		5. SYARIFUDDIN M. PABABARI	
		6. H. SANUSI K. BA.	
		7. SYAHRIR AMIN, S.Pd.	
		8. MUH. YUSRI M. NOER, ST.	
		9. Ir. GUNAWAN RASYID	
		10. MUHAMMAD ISHAK YUNUS, S.Sos.	
		11. JASMAN S., S.Pd	
		12. AHMAD RYIAD, SP	
		13. MUNIR M.	
		14. IMRAN DJAMAL, SE.	
		15. CAMAT SE-WILAYAH MAMUJU TENGAH	
		16. KEPALA DINAS CABANG SE-WILAYAH MAMUJU TENGAH	
		17. KEPALA PUSKESMAS SE-WILAYAH MAMUJU TENGAH	
		18. KEPALA STASION TYRI SUL – BAR	
		19. PIMPINAN REDAKSI RADAR SUL – BAR	
DIVISI – DIVISI	:		
a. USAHA DANA	:	1. SAMIRAN, SE., MMA.	(Koordinator)
		2. Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM.	
		3. BASRI NAWIR, SE., M.Si.	
		4. Ir. SYAHRUL BURHANUDDIN	
		5. H. BAHRUN RASYID, S.Sos., M.Sc.	
		6. H. M. RIZAL PABABARI	
		7. H. SUKARDI	
		8. A. FARID AMRI, S. Sos.	
		9. Ir. H. NAHARUDDIN PABABARI	

		10. Ir. M. ISWADI BANDU	
		11. MUH. NUR, SE.	
		12. Ir. ALMES AMEDIAN, MM.	
		13. AKHMAD KAMIL, ST.	
		14. H. NAHRAWI	
		15. H. ARDIN NGARU	
		16. JUNAEDI	
		17. H. ABD. WAHAB	
		18. H. DAMRIS, S.Pd.	
		19. ABD. MANNANG	
b. KESEHATAN	:	1. dr. HIJRIAH RASAK	(Koo
		2. dr. AWALUDDIN	
		3. BAHTIAR	
		4. Hj. NAHDA RIJAL	
		5. BAHARUDDIN	
		6. KHAIRUDDIN AWIL	
c. KEAMANAN		1. TENNI TAMPAKE	(Koor
		2. ABDIS SALAM	
		3. TOHALUDDIN	
		4. FIRMAN H. LOLO	
		5. SURIADI	
		6. MUSTAMIN	
		7. MULHAM	
		8. SIDRAH SYUKUR	
d. DEKLARASI & SOSIALISASI	:	1. AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.S.I.	(Koor
		2. IDHAR IDRIS, S.Pd, M.Pd.	
		3. Drs. ABD. AZIS ANDI JAYA	
		4. Drs. H. ZAINUDDIN H.	
		5. RUSTANG, S.Ag.	
		6. Drs. MUHAMMAD SAID	
		7. M. ARIF YASIN	
		8. MUH. AMIN, SP.	
		9. LUKMAN RIJAL, S.Sos.	
		10. SYAHRIR	
		11. ZULKIFLI RAMLI, S.IP.	
		12. KAMSUL	
		13. MUHAMMAD ILHAM	
e. HUMAS & PUBLIKASI	:	1. ARIANTO, AP.	(Koord
		2. RAKHMAT THAHIR, ST., M.Si.	
		3. H. A. GAPRI GALLING, S.Sos., MM	
		4. ASKARI ANWAR, S.Sos, M.Si.	
		5. SYAFARUDDIN SUNUSI DM, S.Sos.	
		6. MURSIDIN LAHAMA, S.Sos.	
		7. AFDHALUDDIN PARAMPASI, SE.	
		8. JALAL RAHMAN	
		9. HASAN Dg. SIAMA'	
f. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, KORCAM & DESA	:	1. H. ABD. WAHAB LEBU	(Koordi
		2. AKBAR AS'AD MUDA	(Korcam Pa
		3. AMIRUDDIN, HB	(Korcam Pa
		4. M. SAHID, BA.	(Korcam Budong Bu
		5. DEMMABONE	(Korcam Budong Bu
		6. HASANUDDIN, S. Ag.	(Korcam Tc

7. ANWAR LAUMMA (Korc
8. ASHAR DJAMAL (Korc
9. SUHARSOYO (Korc
10. M. SYAHRIR (Korc
11. BUDIASE (Korc

- g. HUKUM & PEMBELAAN :
1. BASIT AMRI, SH., MH. (P
 2. H. IRWAN SATYA PUTRA PABABARI. SH.
 3. MUSRA AWALUDDIN, SH.
 4. FADLIAH RASAK, SH.
 5. HASAN KHAERUDDIN

- h. AKSI & PENERANGAN MASSA :
1. HADERANA (I
 2. Drs. MASRI ANWAR
 3. AMRIL Dg. MARRUI
 4. INCE MUH. TADJUDDIN U.
 5. MUH. RUSDI LANGGOPA
 6. HERMAN TAMBUNG
 7. INCE IRWAN TAHIR
 8. RUSMAN
 9. M. HATTA
 10. KEPALA DESA SEWILAYAH MAMUJU TENGAH

Ditetapkan di : Mamuju
Tanggal : 29 Agustus

FORMATUR

FORUM PERCEPATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA UMUM

ARUCHUL THAHIR



SEKRETARIS UMUM

H. MUH. ANWAR KAMIL, S

KOMITE AKSI PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH (KAP-MATENG)

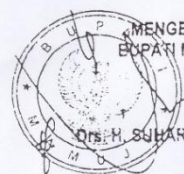
KETUA UMUM

H. ARSAL ARAS TAMMAUNI



SEKRETARIS UMUM

MAHYUDDIN, S.Ag., M.P



MENGETAHUI
BUPATI MAMUJU

Drs. H. SUHARDI DUKA, MM.

Lampiran 10: Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah



Lampiran 11: Dokumentasi



Foto 1: Foto rapat dan syukur bersma Komite Percepatan Pembentukan Mamuju Tengah (Google.com)



Foto 2: Bersama dengan informan Bapak Marthen
(foto: Yulia Nur Zannah, 25 Juli 2016)



Foto 3: Bersama dengan informan Bapak Aruchul Tahir
(foto: Agus Santoso, 29 juli 2016)

